

Sukarno:
“Pancasila”

Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia.

Saya minta, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain: maafkanlah saya memakai perkataan “kebangsaan” ini! Saya pun orang Islam. Tetapi saya meminta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah paham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu *nationale staat*, seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu *Nationale Staat* Indonesia bukan berarti staat yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuan pun orang Indonesia, nenek tuan pun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nenek moyang tuan pun bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan negara Indonesia.

Satu *Nationale Staat*! Hal ini perlu diterangkan lebih dahulu, meski saya di dalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit-sedikit telah menerangkannya. Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempo sedikit: Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa?

Menurut Renan syarat bangsa: ‘le desir de ‘etre ensemble’, yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.

Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer, di dalam bukunya “Die Nationalitätenfrage”, di situ ditanyakan: “What is eine Nation?” dan jawabnya ialah: “Eine Nation ist eine aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft”. Inilah menurut Otto Bauer satu *natie*. (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib).

Tetapi kemarin pun, tatkala, kalau tidak salah, Prof. Soepomo menisirkan Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Mr. Yamin berkata: “verouderd”, “sudah tua”. Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah “verouderd”, sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Ernest Renan mengadakan definisinya itu, tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu *wetenschap* baru, satu ilmu baru, yang dinamakan Geopolitik.

Kemarilah, kalau tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo, atau tuan Moenandar, mengatakan tentang “Persatuan antara orang dan tempat”. Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya!

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan “Gemeinschaftnya dan perasaan orangnya. ‘I‘ame et le desir’. Mereka hanya mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu ya tanah-air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah SWT membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana “kesatuan-kesatuan” di situ. Seorang anak kecil pun jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa

kepulauan Indonesia merupakan satu eksatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau diantara 2 lautan yang besar, lautan Pasific dan lautan Hindia, dan diantara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa, pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan lain-lain pulau kecil diantaranya, adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir Timur benua Asia sebagai 'golfbreker' atau pengadang gelombang lautan pasific adalah satu eksatuan.

Anak kecil pun dapat melihat, bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan.

Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah SWT demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athene saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athene plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani adalah satu kesatuan.

Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut Geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah SWT menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah tanah air kita!

Maka jikalau saya ingat perhubungan antara orang dan tempat, antara rakyat dan buminya, maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan oleh Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak cukup 'le desire d'etre ensemble', tidak cukup definisi Otto bauer 'aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft' itu. Maaf saudara-saudara, saya mengambil contoh Minangkabau. Diantara bangsa Indonesia, yang paling ada 'le desire d'etre ensemble', adalah rakyat Minangkabau, yang banyaknya kira-kira 2,5 milyon. Rakyat itu merasa dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan hanya satu bagian kecil daripada kesatuan! Penduduk Yogya pun adalah merasa 'le desire d'etre ensemble', tetapi Yogya pun hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan. Di Jawa Barat rakyat pasundan sangat merasakan 'le desire d'etre ensemble', tetapi Sunda pun hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan.

Pendek kata, bangsa Indonesia, Natie Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan 'le desire d'etre ensemble' di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang, menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah SWT, tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya! Karena antara manusia 70.000.000 ini sudah ada 'le desire d'etre ensemble' sudah terjadi Charaktergemeinschaft! Natie Indonesia, bangsa Indonesia, ummat Indonesia jumlah orangnya adalah 70.000.000, tetapi 70.000.000 yang telah menjadi satu, satu, sekali lagi satu!

Ke sinilah kita semua harus menuju: mendirikan satu Nationale Staat, di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan diantara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan "golongan kebangsaan". Ke sinilah kita harus menuju semuanya.

Saudara-saudara, jangan orang mengira, bahwa tiap-tiap negara merdeka adalah satu nationale staat! Bukan Pruisen, bukan Beieren, bukan Saksen adalah nationale staat, tetapi seluruh Jermanialah satu nationale staat. Bukan bagian kecil-kecil, bukan Venetia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italia, yaitu seluruh semenanjung di Laut Tengah, yang di utara dibatasi oleh pegunungan Alpen, adalah nationale staat. Bukan Benggala, bukan Punyab, bukan Bihar dan Orissa, tetapi seluruh segi-tiga Indialah nanti harus menjadi nationale staat.

Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di jaman dahulu, adalah natonale staat. Kita hanya 2 kali mengalami nationale staat, yaitu zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Di luar itu kita tidak mengalami natonale staat. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu, saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokroesoemo, bahwa Mataram meski pun merdeka bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Parbu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata bahwa kerajaannya bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, saya berkata, bahwa kerajaannya di Banten, meskipun merdeka, bukan satu nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanuddin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan nationale staat.

Nationale staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat...

Saudara-saudara. Tetapi...tetapi...memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya! Bahayanya ialah, mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berpaham 'Indonesia uber alles'. Inilah bahayanya, kita cinta tanah air yang satu merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia! Ingatlah akan hal ini.

Gandhi berkata: "Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan". "My nationalism is humanity".

Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa yang mengatakan, "Deutschland uber alles", tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya bangsanya minulyo, berambut jagung dan bermata biru 'bangsa Aria', yang dianggapnya tertinggi di atas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas asas demikian. Tuan-tuan jangan berkata bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.

Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofisch principe yang nomro dua, yang saya usulkan kepada tuan-tuan yang boleh saya namakan 'internasionalisme'. Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme bukanlah saya

bermaksud kosmopolitisme yang tidak mau adanya kebangsaan yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika dan lain-lainnya.

Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi dua hal ini saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain.

Kemudian, apakah dasar yang ketiga? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara 'semua buat semua', 'satu buat semua, semua buat satu'. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan.

Untuk pihak Islam ialah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, saya pun adalah orang Islam—maaf beribu maaf ke-Islaman saya jauh belum sempurna—tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapat tidak lain tidak bukan, hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat kita perbaiki segala hal juga, keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan dalam Badan Perwakilan Rakyat.

Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Di sinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam marilah kita bekerja sehebat-hebatnya agar supaya, sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan rakyat yang kita adakan diduduki oleh utusan-utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam Badan Perwakilan ini. Ibaratnya Badan Perwakilan rakyat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja sekeras-kerasnya agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya, hukum-hukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakyat itu hukum Islam pula. Malahan saya yakin jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat sehingga 60 persen, 70 persen, 80 persen, 90 persen utusan adalah orang islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam di atas bibir saja. Kita berkata 90 persen daripada kita beragama Islam, tetapi lihatlah didalam sidang ini yang memberikan suaranya kepada Islam? Maaf seribu maaf, saya tanya hal itu! Bagi saya hal itu adalah satu bukti bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat. Oleh karena itu saya minta kepada saudara-saudara sekalian baik yang bukan Islam maupun terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor tiga ini yaitu prinsip permusyawaratan perwakilan. Dalam perwakilan nanti, ada perjuangan

sehebat-kuatnya, tidak ada satu negara yang hidup betul-betul hidup jikalau di dalam badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah cadradimuka kalau tidak ada perjuangan paham di dalamnya. Baik di dalam negara Islam maupun di dalam negara Kristen perjuangan selamanya ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat! Di dalam perwakilan rakyat saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen bekerjalah sehebat-kuatnya, kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil bekerjalah mati-matian agar supaya sebagian besar daripada utusan-utusan yang masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang Kristen. Itu adil—fair play! Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup kalau tidak ada perjuangan di dalamnya. Jangan kira di Turki tidak ada perjuangan. Jangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. Allah SWT memberi pikiran kepada kita agar supaya dalam pergaulan kita sehari-hari kita selalu bergosok seakan-akan menumbuk, membersihkan gabah supaya keluar daripadanya beras dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Terimalah saudara-saudara prinsip nomor tiga, yaitu prinsip permusyawaratan.

Prinsip nomor 4, sekarang saya usulkan. Saya di dalam tiga hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka...jangan saudara kira bahwa kalau badan perwakilan rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat di negara-negara Eropa adalah badan perwakilan adalah parlementaire democratie. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela?

Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum Kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua Barat kaum Kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat! Tak lain tak bukan sebabnya, ialah oleh karena badan-badan perwakilan rakyat yang diadakan di sana itu, sekedar menurut reseponya Fransche Revolutie. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan Democratie disana itu hanyalah Politieke Democratie saja; semata-mata tidak ada Sociale Rechtvaardigheid-tak ada keadilan sosial, tidak ada Ekonomische Democratie sama sekali. Saudara-saudara, saya ingat akan kalimat seorang pemimpin Perancis, Jean Jaures, yang menggambarkan Politieke Democratie. “Di dalam Parlementaire Democratie”, kata Jean Jaures, ”di dalam Parlementaire Democratie, tiap-tiap orang mempunyai hak sama. Hak Politieke yang sama, tiap-tiap orang boleh memilih, tiap-tiap orang boleh masuk di dalam Parlemen. Tetapi adakah Sociale rechtvaardigheid, adakah kenyataan kesejahteraan di kalangan Rakyat?” Maka oleh karena itu Jean Jaures Berkata lagi:

“Wakil kaum buruh yang mempunyai hak Politiek itu, di dalam Parlemen dapat menjatuhkan minister. Ia seperti Raja tetapi di dalam dia punya tempat bekerja di dalam pabrik—sekarang ia menjatuhkan minister, besok dia dapat dilempar ke luar ke jalan raya, dibikin werkloos, tidak dapat makan suatu apa”.

Adakah keadaan demikian ini yang kita kehendaki?

Saudara-saudara saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-ekonomische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu-Adil? Yang dimaksud dengan paham Ratu-Adil, ialah *sociale*

rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu-Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politiek democraie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politiek rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid. Kita akan bicarakan hal-hal ini bersama-sama, saudara-saudara di dalam badan permusyawaratan...

Prinsip yang kelima hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan. Yakni dengan tiada 'egoisme-agama'. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!

Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad SAW telah memberi bukti yang cukup tentang *verdraagzaamheid*, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan *verdraagzaamheid* itu. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah, Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!

Di sinilah dalam pengakuan azas yang kelima inilah saudara-saudara segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan negara kita akan bertuhan pula!

Ingatlah prinsip ketiga, permufakatan, perwakilan, di situlah tempatnya kita mempropagandakan ide kita masing-masing dengan cara yang tidak *overdraagzaam*, yaitu dengan cara yang berkebudayaan.

Saudara-saudara! "Dasar-dasar Negara" telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang lima bilangannya? (seorang yang hadir: pendawa lima). Pendawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima pula bilangannya.

Namanya bukan Panca Dharma tetapi—saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa—namanya ialah Panca Sila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi.

Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah ‘perasan’ yang ketiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka, weltanschauung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan prikemanusiaan saya peras menjadi satu, itulah yang dahulu saya namakan socio-nationalisme.

Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tetapi politiek-economische democratie, yaitu politieke democratie dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi satu. Inilah yang dulu saya namakan socio-democratie.

Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain.

Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: socio-nationalisme, socio-democratie dan ketuhanan. Kalau tuan senang kepada simbolik 3, ambillah yang 3 ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang dengan kepada tri sila ini dan minta satu dasar saja? baiklah saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu?

Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia—semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi 3, dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara gotong royong!

“Gotong royong” adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari ‘kekeluargaan’, saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu paham yang statis tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong!

Prinsip gotong royong diantara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Inilah saudara-saudara, yang saya usulkan kepada saudara-saudara.

Sumber: Petikan ini berasal dari pidato yang disampaikan pada 1 Juni 1945 di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. (Direproduksi dalam, Feith & Castles, 1988: 15-26)

Mohammad Hatta:
“Masyarakat Kolonial dan Cita-cita Demokrasi Sosial”

Di mata perekonomian kapitalis yang datang menyerbu, Indonesia merupakan suatu perkebunan besar. Eksploitasinya didasarkan kepada dua faktor yang menguntungkan, yaitu tanah yang subur dan upah buruh yang murah. Dua faktor yang memperbesar tenaga konkurensi! Produksi tidak dilakukan untuk memuaskan keperluan di dalam negeri, melainkan untuk pasar dunia yang menjamin keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebagai daerah penjualan barang-barang industri Nedherland, Indonesia belum begitu berharga. Fungsi ekonominya yang terutama ialah sebagai daerah produksi semata-mata. Karena itu *export-economic* menjadi corak perekonomian Hindia-Belanda.

Ditilik dari struktur politiknya, Hindia-Belanda merupakan suatu *Politie-Staat*, suatu bentuk organisasi negara yang sesuai dengan cita-cita si penjajah untuk menguasai seluruhnya, politik, ekonomi dan sosial. Di situ tidak ada tempat bagi demokrasi. Semuanya tersusun di dalam *sistem hierarchi*: pangreh praja, polisi, tentara. Di dalam sistem itu ditempatkan, sebagai kakinya, organisasi yang rasional daripada yang disebut *Inlands Bestuur* yang berpucuk pada Bupati. Di atas pundak bupati itu tersusun suatu sistem *Europees Bestuur* yang kukuh, yang menyusun perintah yang akan disampaikan ke bawah dan mengadakan pengwasan atas pegawai-pegawai pemerintah bumi putera. Yang terutama dihargai bukan pegawai bumiputera yang cakap dan bercita-cita, melainkan mereka yang paling pandai menjalankan perintah.

Karena itulah maka masyarakat Indonesia, yang tertekan dan tertindas di bawah, tidak bisa berkembang dan bertunas. Semakin dalam kapitalisme masuk ke dalam masyarakat Indonesia, semakin rusak penghidupan rakyat yang tidak mempunyai pertahanan lagi. Sendi-sendi masyarakat hancur karena tiga macam sistem penghisapan yang dilakukan berturut-turut selama tiga abad, yaitu sistem OIC, *cultuurstelsel* dan sistem inisiatif partikular. Dan dalam segala pemerasan itu, pemerintah jajahan di mana perlu bersikap—menurut kata JE Stokvis—*als de natuurlijke hoeder van het koloniale kapitalisme*.

Dengarlah pula betapa hebatnya Prof. Boeke menggambarkan kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh kapitalisme kolonial itu di Indonesia:

“Asas-asas liberal yang menempatkan orang-seorang di muka sebagai sendiri perusahaan dan serangan kapitalisme, telah merubuhkan di Indonesia—lebih lagi di Eropa—sendi-sendi persekutuan hidup dan menghalau kaum yang lemah menyerbukan diri ke dalam perjuangan sosial yang begitu sedih. Kita semuanya tahu, bahwa kapitalisme yang berusia penuh ini masuk ke Indonesia sebagai perampas dan melakukannya dalam beberapa puluh tahun saja. lebih ganas lagi dari di Eropa tampak di tanah jajahan bekas politik, yang berpedoman kepada keperluan mereka yang mempunyai alat yang cukup, pengetahuan yang tinggi dan senantiasa siap untuk berjuang. Politik perekonomian yang membuka pintu Indonesia untuk kapitalis yang keras hati, politik perhubungan yang mendekatkan segala yang jauh dan merombak pagar persaingan, asas kemerdekaan berdagang yang membukakan pintu kepada lawan bersaing dari luar, kemerdekaan pasar yang mempertajam persaingan perniagaan dalam negeri, aturan bayar pajak yang semakin lama semakin dilakukan dengan uang dan mengenai diri seseorang, undang-undang dan

pengadilan cara Barat, politik, pendidikan—semuanya itu merombak susunan pergaulan hidup anak negeri serta organisme sosial yang ada, sehingga orang banyak yang bertenaga lemah tidak sanggup bertahan. Persekutuan sosial yang ada diruntuhkan dengan tidak diganti dengan yang baru, dihancurkan dengan tidak didirikan tukarannya, kemelaratan ditimbulkan dengan tidak membangkitkan tenaga yang baru, dan karena itu hasilnya membinasakan semangat manusia.”

Ini bukan ucapan seorang revolusioner Indonesia, melainkan hasil analisa ilmiah dari seorang ekonom kolonial yang dalam perasaan kemanusiaannya.

Pengetahuan ini beserta penghidupan rasial dan individual yang dialami sehari-hari memberikan isi kepada cita-cita Indonesia Merdeka di kemudian hari. Dan pengetahuan tentang cita-cita kolonial Belanda, yang tidak memberikan tempat sedikit pun kepada tujuan Indonesia berpemerintah sendiri, memperkuat semangat kebangsaan. “Indonesia Merdeka, bersatu dan tidak terpisah-pisah” serta “berjuang atas kekuatan tenaga sendiri” menjadi semboyan pergerakan nasional. Ucapan pemimpin-pemimpin Belanda seperti H. Colijn, yang mengatakan, bahwa kepada kaum pergerakan Indonesia harus ditegaskan bahwa kekuasaan Belanda di Indonesia kuat duduknya seperti Mont-Blanc di atas Alpen, hanya dapat membakar semangat kebangsaan Indonesia yang sudah berkobar.

Menundukkannya tak mungkin lagi!

Demikianlah lahir dalam pangkuan kemerdekaan dahulu empat dari pada sila yang lima yang menjadi sendi negara sekarang: per-kemanusiaan, persatuan Indonesia, kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Semuanya itu cita-cita buat masa datang sebagai reaksi kepada realitet yang pahit: kesengsaraan rakyat, penghinaan bangsa, pemerasan dan penderitaan nasional, di bawah suatu kekuasaan autokrasi kolonial.

Indonesia Merdeka di masa datang mestilah negara nasional, bersatu dan tidak terpisah-pisah, bebas dari penjajahan asing dalam rupa apa pun juga, politik maupun ideologi. Dasar-dasar perikemanusiaan harus terlaksana dalam segala segi penghidupan, dalam perhubungan antara seorang dengan seorang, antara majikan dan buruh, antara bangsa dan bangsa. Lahir dalam perjuangan menentang penjajahan, cita-cita perikemanusiaan tidak saja bersifat anti-kolonial dan antiimperialis, tetapi juga menuju kebebasan manusia dari segala tindasan. Pergaulan hidup harus diliputi oleh suasana kekeluargaan dan persaudaraan. Literatur sosial yang banyak dibaca dan pergerakan kaum buruh Barat yang dilihat dari jauh dan dari dekat, memperkuat cita-cita itu menjadi keyakinan.

Perasaan itu, yang begitu meresap di dalam jiwa pergerakan nasional, dinyatakan kemudian sebagai pendirian pokok di dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Republik Indonesia, “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Apabila *Universal Declaration of Human Rights* yang 30 pasal, yang diterima sebagai usul di dalam sidang PBB di Paris pada tanggal 10 Desember 1948, memuat pasal 1 bahwa *all human beings are born free and equal in dignity and rights*, maka pernyataan ini terdengar oleh penganjur-penganjur Indonesia yang berjuang dahulu sebagai pemuda dan perintis, sebagai suaranya sendiri. Mereka merasa, seolah-olah orang mau merealisasi cita-cita mereka yang lama itu di dalam pergaulan hidup internasional. Apabila cita-cita itu sudah dipandang patut

dilaksanakan dalam hubungan internasional, apakah ia akan ditinggalkan di dalam hubungan nasional?

Suatu masalah yang prinsipil lagi harus dipecah! Apabila Indonesia sampai merdeka, bagaimanakah mestinya bentuk negaranya? Pengalaman dengan pemerintahan autokrasi kolonial dalam bentuk negara-kepolisian menghidupkan di dalam kalbu kaum muda Indonesia cita-cita negara hukum yang demokratis. Negara itu haruslah berbentuk Republik, berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi paham kedaulatan rakyat yang dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau, yang bersifat individualisme. Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi Indonesia yang asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun dalam masyarakat sendiri. Demokrasi Barat apriori sudah ditolak.

Dalam mempelajari Revolusi Perancis 1789, yang terkenal sebagai sumber Demokrasi Barat, ternyata bahwa trilogi “kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan” yang menjadi semboyannya tidak terlaksana di dalam praktek. Itu tidak mengherankan, karena Revolusi Perancis meletus sebagai revolusi individual untuk memerdekakan orang-orang dari ikatan feodalisme. Kemerdekaan individu diutamakan. Dalam merealisasinya orang lupa akan rangkaiannya dengan persamaan dan persaudaraan.

Selagi Revolusi Perancis tujuannya hendak melaksanakan cita-cita samarata sama rasa—sebab itu di sebelah kemerdekaan individu dikemukakan persamaan dan persaudaraan—demokrasi yang dipraktekkan hanya membawa persamaan politik.

Dalam politik hak seseorang sama dengan yang lain; kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan sama-sama menyukai hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat. Tetapi lebih dari itu tidak ada persamaan. Dalam perekonomian tetap berlaku dasar tidak-sama. Malahan dengan berkobarnya semangat individualisme, yang dihidupkan oleh Revolusi Perancis, kapitalisme subur tumbuhnya. Pertentangan kelas bertambah hebat, penindasan yang lemah ekonominya oleh yang kuat bertambah kejam. Di mana ada pertentangan yang hebat antara berbagai kepentingan, di mana ada golongan yang menindas dan tertindas, di situ sukar di dapat persaudaraan. *Stelsel* bertanggungjawab sendiri di dalam ekonomi membawa akibat, bahwa hidup buruh hanya terjamin selama ia kuat dan dapat bekerja. Ia terlempar dan terlantar, apabila ia sudah tua dan sakit-sakit dan tenaganya bekerja sudah lemah.

Nyatalah, bahwa demokrasi yang semacam itu tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan Indonesia yang menciptakan terlaksananya dasar-dasar perikemanusiaan dan keadilan sosial. Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan tidak ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan sosial yang terbayang di muka, dijadikan program untuk dilaksanakan di dalam praktek hidup nasional di kemudian hari.

Jika ditilik benar-benar, ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial itu di dalam kalbu pemimpin-pemimpin Indonesia di waktu itu. *Pertama*, paham sosialisme Barat, yang menarik perhatian mereka karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Kedua, ajaran Islam, yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang pengasih dan penyayang. Ketiga, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan keloktivismenya. Paduan semuanya itu hanya memperkuat keyakinan, bahwa bangun demokrasi yang akan menjadi dasar pemerintahan Indonesia Merdeka di kemudian hari haruslah suatu perkembangan daripada demokrasi asli, yang berlaku di dalam desa Indonesia.

Negara-negara Indonesia lama adalah negara feodal, yang dikuasai oleh raja autokrat. Sungguh pun begitu, di dalam desa-desa sistem demokrasi terus berlaku, tumbuh dan hidup sebagai adat-istiadat. Bukti ini menanam keyakinan, bahwa demokrasi Indonesia yang asli kuat bertahan, liat hidupnya, tidak lakang dek poaneh, indak lapuak dek hujan. Inilah pula dasarnya, apa sebab demokrasi asli itu begitu di-idealisir di dalam pergerakan kebangsaan dahulu. Banyak pemimpin yang mengangaunya sudah cukup lengkap untuk dijadikan dasar pemerintahan negara modern. “Angkatan feodalisme dan kapitalisme yang menindasnya—demikian kata mereka—ia akan kembang ke atas dan hidup dengan suburnya di atas rumpun yang sehat!”

Analisa sosial menunjukkan bahwa demokrasi asli Indonesia kuat bertahan di bawah feodalisme, karena tanah sebagai faktor produksi yang terpenting adalah milik bersama kepunyaan masyarakat desa. Bukan kepunyaan raja. Dan sejarah sosial di benua Barat memperlihatkan bahwa pada zaman feodalisme milik-tanah adalah dasar kemerdekaan dan kekuasaan. Siapa yang hilang haknya atas tanah, hilang kemerdekaannya. Ia terpaksa menggantungkan hidupnya kepada orang lain; ia menjadi budak pekarangan tuan tanah. Siapa yang memiliki tanah yang luas, ia mempunyai kekuasaan, dan besar kekuasaan itu sepadan pula dengan luas tanah yang dimiliki.

Oleh karena dalam Indonesia dahulu-kala milik tanah adalah pada masyarakat desa, maka demokrasi desa boleh ditindas hidupnya oleh kekuasaan feodal yang meliputinya, dari atas, tetapi tidak dapat dilenyapkan. Berdasarkan milik bersama atas tanah, maka tiap-tiap orang seorang dalam mempergunakan tenaga ekonominya merasa perlu akan persetujuan kaumnya. Kelanjutan daripada itu didapati pula, bahwa segala usaha yang berat, yang tidak dikerjakan oleh tenaga orang-seorang, dikerjakan bersama secara gotong-royong. Bukan saja hal-hal yang menurut sistem yuridis barat termasuk ke dalam golongan hukum publik dikerjakan begitu, tetapi juga mengenai hal-hal *prive*, seperti mendirikan rumah, mengrajakan sawah, mengantar mayat ke kubur dan lain-lainnya. Adat hidup semacam itu, yang berdasarkan hak-hak milik bersama tadi atas tanah, membawa kebiasaan bermusyawarah. Segala keputusan tentang soal-soal yang mengenai kepentingan umum diambil dengan kata sepakat. Seperti disebut dalam pepatah Minangkabau: bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Kebiasaan menetapkan keputusan dengan mufakat menimbulkan kebiasaan mengadakan rapat pada tempat yang tertentu, di bawah pimpinan kepala desa. Segala orang dewasa anggota asli desa berhak hadir dalam rapat itu.

Dengan itu belumlah lengkap disebut anasir-anasir demokrasi dalam desa Indonesia yang asli. Ada dua lagi, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama atas peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil, dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah di bawah kekuasaan raja, apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana. Benar atau tidak, yang kemudian ini sering dianggap sebagai hak orang-seorang untuk menentukan nasib sendiri. Seperti diketahui, hak mengadakan protes bersama biasa dilakukan sampai pada masa yang akhir ini. Apabila rakyat merasa keberatan sekali atas peraturan yang diadakan oleh Bupati atau Wedana atau pembesar lainnya, maka kelihatan banyak sekali orang datang ke alun-alun dan duduk di sana beberapa dengan tiada berbuat apa-apa. Tidak sering rakyat Indonesia dahulu, yang bersifat sabar dan suka menurut, berbuat begitu. Akan tetapi, apabila ia sampai berbuat begitu, maka itu menjadi pertimbangan bagi penguasa, apakah ia akan mencabut kembali atau mengubah perintahnya.

Kelima anasir demokrasi asli itu: rapat, mufakat, tolong menolong atau gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkirkan diri dari kekuasaan raja, dipuja di dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial, yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia Merdeka di masa datang.

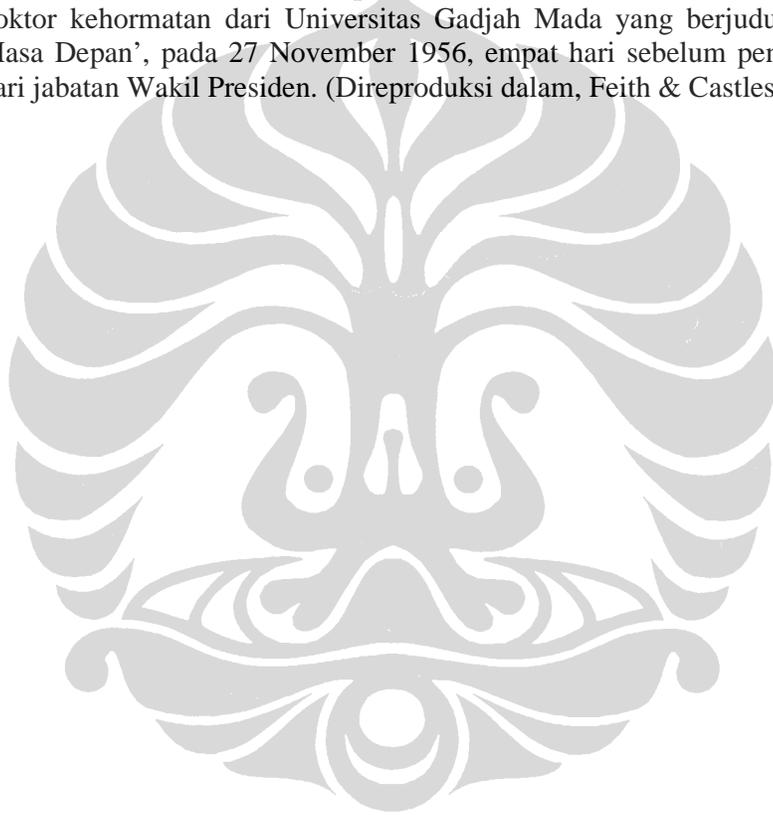
Analisa yang dikerjakan kemudian dengan tenang, bebas dari keinginan meidealisir segala yang asli dari kita, menunjukkan bahwa tidak semuanya mana yang nampak bagus pada demokrasi desa dapat dipakai begitu saja pada tingkat negara. Mufakat yang dipraktikkan di desa-desa ialah mengambil keputusan dengan kata sepakat, dengan persetujuan semuanya setelah masanya diperbincangkan dengan panjang lebar. Sebelum terdapat kata sepakat, belum diambil keputusan, dan halnya terus dibicarakan di dalam dan di luar rapat. Keputusan dengan mufakat tidak mungkin tercapai di dalam Dewan Perwakilan Rakyat, di mana terdapat berbagai partai dan pertentangan politik. Dalam hal ini, mau tidak mau, orang harus menerima sistem demokrasi Barat, yaitu mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Sebaliknya, 'mufakat' yang dipaksakan sebagaimana lazim terjadi di negeri-negeri totaliter tidaklah sesuai dengan oaham demokrasi Indonesia, sebab mufakat baru jadi sebagai hasil daripada permusyawaratan. Dengan tidak ada musywarat, dimana tiap-tiap orang berhak untuk menyatakan pendapatnya, tidak ada mufakat. Tetapi di dalam masyarakat kolektif yang demokratis, seperti di Indonesia, mentalitet orang-seorang berlainan dari di dalam masyarakat individualis. Dalam segala tindakannya dan menyatakan pendapatnya, ia terutama dikemudian oleh kepentingan umum. Dalam keselamatan kesemuanya terletak kepentingannya sendiri. Sebab itu pada dasarnya, mencapai kata sepakat lebih mudah. Sungguh pun orang-seorang dalam pikirannya dan dalam tindakannya ke luar terikat kepada cita-cita kepentingan umum, ia bukan obyek semata-mata daripada kolektivitet, seperti yang berlaku dalam negara totaliter. Ia tetap subyek yang mempunyai kemauan, merdeka bergerak untuk mengadakan perhubungan yang spesial, untuk mengadakan diferensiasi. Dalam perikatan masyarakat ia tetap mempunyai cita-cita, mempunyai pikiran untuk mencapai keselamatannya atau keselamatan umum.

Inilah tipe manusia Indonesia yang tergambar di dalam kalbu waktu berusaha menciptakan suatu sistem demokrasi yang tepat bagi Indonesia Merdeka di masa datang. Betapa pun juga, orang tak mau melepaskan cita-cita demokrasi

sosial, yang banyak sedikitnya bersendi kepada organisasi sosial di dalam masyarakat asli sendiri. Dalam segi politik dilaksanakan sistem perwakilan rakyat dengan musyawarah, berdasarkan kepentingan umum. Autonomi yang luas sebagai cermin daripada 'pemerintahan dari yang diperintah' harus terlaksana. Dalam segi ekonomi dilaksanakan kooperasi sebagai dasar perekonomian rakyat, ditambah dengan kewajiban Pemerintah untuk menguasai atau mengawasi cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam segi sosial diadakan jaminan untuk perkembangan kepribadian manusia. Manusia bahagia sejahtera dan susila menjadi tujuan negara.

Sumber: Pidato disampaikan Mohammad Hatta ketika menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada yang berjudul 'Masa lalu dan Masa Depan', pada 27 November 1956, empat hari sebelum pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden. (Direproduksi dalam, Feith & Castles, 1988: 7-15)



PIDATO MR. SOEPOMO DI DALAM SIDANG BPUPKI
31 MEI 1945

Paduka Tuan Ketua, hadirin yang terhormat!

Soal yang kita bicarakan ialah, bagaimanakah akan dasar-dasarnya Negara Indonesia Merdeka. Tadi oleh beberapa pembicara telah dikemukakan beberapa faktor dari beberapa negara. Syarat-syarat mutlak (*factor-konstitutif*) dari suatu negara. Syarat-syarat mutlak untuk mengadakan negara dipandang dari sudut hukum dan dari sudut formeel, (*jurusipredence*) yaitu harus ada daerah (*territory*), rakyat dan harus ada pemerintah yang daulat (*soverein*) menurut hukum internasional. Akan tetapi syarat-syarat mutlak ini tidak mengenai dasar kemerdekaan dari negara dalam arti sosiologi dan arti politik. Juga suatu syarat mutlak yang telah dibicarakan dalam sidang ini, ialah tentang pembelaan tanah air. Maka pembelaan tanah air sangat penting adanya dan tentang ini saya setuju dengan nasehat-nasehat dan anjuran-anjuran dari pihak pemerintah Balatentara, yaitu Tuan Soomubutyoo yang telah dimuat dalam surat kabar Asia-Raya dan setuju dengan pemandangan yang baru tadi diuraikan oleh anggota yang terhormat tuan Abdul Kadir.

Tentang syarat mutlak lain-lainnya, pertama tentang daerah, aya mufakat dengan pendapat yang mengatakan: “pada dasarnya Indonesia, yang harus meliputi batas Hindia-Belanda”. Akan tetapi jikalau misalnya daerah Indonesia lain, umpamanya negeri Malaka, Borneo Utara, hendak ingin juga masuk lingkungan Indonesia, hal itu kami tidak keberatan. Sudah tentu itu bukan kita saja yang akan menentukan, akan tetapi juga pihak saudara-saudara yang ada di Malaka dan Borneo Utara.

Tentang syarat mutlak kedua, hal rakyat sebagai warga-negara. Pada dasarnya ialah, sebagai warga-negara yang mempunyai kebangsaan Indonesia, dengan sendirinya bangsa Indonesia Asli. Bangsa Peranakan, Tionghoa, India, Arab yang telah berturun temurun tinggal di Indonesian dan sebagai baru saja diuraikan oleh anggota yang terhormat Dahler, mempunyai kehendak yang sungguh-sungguh untuk turut bersatu dengan bangsa Indonesia yang asli, harus diterima sebagai warga-negara dengan diberi kebangsaan Indonesia (*nasonaliteit Indonesia*).

Yang penting juga kita harus menjaga supaya tidak ada “dubbele onderdaanschap” dan menjaga jangan ada ‘staatsloosheid’. Hal ini sebagian tergantung juga dari sistem undang-undang dari negara-negara lain. Sebagian pokok dasar kewarganegaraan Indonesia, ialah *ius sanguinis* (prinsip keturunan) dan *ius soli* (prinsip teritorial).

Syarat mutlak yang ketiga, ialah pemerintah daulat menurut hukum internasional.

Jikalau kita hendak membicarakan tentang dasar sistem pemerintahan yang hendak kita pakai untuk negara Indonesia, maka dasar sistem pemerintahan itu bergantung kepada *Staatsidee*, kepada ‘begrip’ ‘staat’ (negara) yang hendak kita pakai untuk pembangunan negara Indonesia. Menurut dasar apa Negara Indonesia akan didirikan? Oleh anggota yang terhormat Mohammad Hatta dan lain-lain pembicara dikemukakan 3 staat ialah:

Pertama, apakah Indonesia akan berdiri sebagai persatuan negara (*eenheidsstaat*) atau negara serikat (*bondstaat*) atau sebagai persekutuan negara (*statendbond*).

Kedua, dipersoalkan perhubungan antara negara dan agama, dan;

Ketiga, apakah Republik atau Monarchi. Menurut pendapat saya, hadirin yang terhormat, sebelumnya kita membicarakan soal persatuan negara, atau negara serikat, Republik atau Monarchi, terlebih dahulu kita harus membicarakan soal yang disebut negara itu, negara menurut dasar pengertian apa, oleh karena segala pembentukan susunan negara itu tergantung daripada dasar pengertian negara (*staatsidee*) tadi.

Tentang persatuan negara atau negara serikat atau tentang Republik atau Monarchi, itu sebetulnya menurut pendapat saya, soal bentuk susunan negara. Maka sekarang saya hendak membicarakan dasarnya Negara Indonesia Merdeka. “Negara” menurut dasar pengertian (*Staatsidee*) apa?

Sebagai tuan-tuan telah mengetahui, dalam ilmu negara kita mendapati beberapa teori, beberapa aliran pikiran tentang negara. Marilah dengan singkat kita meninjau teori-teori negara itu.

1. Ada suatu aliran pikiran yang menyatakan bahwa negara itu terdiri atas dasar teori perseorangan, teori individualistis, sebagai diajarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke (abad ke-17), Jean Jaques Rousseau (Abad ke-18), Herbert Spencer (abad ke-19), HJ. Laski (Abad ke-20). Menurut aliran pikiran ini, negara ialah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak antara seluruh seseorang dalam masyarakat itu (*contract social*). Susunan hukum negara yang berdasar individualisme terdapat di negeri Eropa Barat dan di Amerika.
2. Aliran pikiran lain tentang negara ialah teori ‘golongan’ dari negara (*class theory*) sebagai diajarkan oleh Marx, Engels, dan Lenin. Negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan (sesuatu *klasse*) untuk menindas *klasse* lain. Negara ialah alatnya golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan-golongan lain, yang mempunyai kedudukan yang lembek. Negara kapitalistis, ialah perkakas *bourgeoisie* untuk menindas kaum buruh, oleh karena itu para Marxis menganjurkan revolusi politik dari kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara agar kaum buruh dapat menindas kaum *bourgeoisie*.
3. Aliran pikiran lain lagi dari pengertian negara ialah, teori yang dapat dinamakan teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel, dan lain-lain (abad 18 dan 19). Menurut pikiran ini negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara berdasar aliran pikiran integralistik ialah penghidupan

bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Sekarang tuan-tuan akan membangunkan Negara Indonesia atas aliran pikiran mana?

Kami hendak mengingatkan lagi nasehat P.T. Soomubutyoo, bahwa pembangunan negara bersifat barang yang bernyawa. Oleh karena itu corak dan bentuknya harus disesuaikan dengan keadaan umum pada masa sekarang dan harus mempunyai keistimewaan yang sesuai dengan keadaan umum tadi. Kecuali itu, P.T. Soomubutyoo juga memberi nasehat janganlah kita meniru belaka susunan negara lain. Contoh-contoh dari negara lain itu hendaknya menjadi peringatan saja, supaya bangsa Indonesia jangan sampai mengulang kegagalan yang telah dialami oleh bangsa lain, atau paling banyak hanya mengambil contoh-contoh yang sungguh patut dipandang sebagai teladan.

Sungguh benar, dasar dan bentuk susunan dari suatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (*rechtsgeschiede*) dan lembaga sosial (*sociale structuur*) dari negara itu. Berhubung dengan itu apa yang baik dan adil untuk suatu negara, belum tentu baik dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama.

Tiap-tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri berhubung dengan riwayat dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu politik pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan 'sociale structuur' masyarakat Indonesia, yang nyata pada masa sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman, misalnya cita-cita Negara Indonesia dalam lingkungan Asia Timur Raya.

Dengan mengingat ini, marilah kita melihat contoh-contoh dari negara-negara lain. Dasar susunan hukum negara Eropa Barat ialah perseorangan dan liberalisme. Sifat perseorangan ini, yang mengenai segala lapangan hidup (sistem undang-undang ekonomi, kesenian dan lain-lain), memisah-misahkan manusia sebagai seseorang dari masyarakatnya, mengasingkan diri dari segala pergaulan yang lain. Seorang manusia dan negara yang dianggap sebagai seseorang pula, selalu segala-galanya itu menimbulkan imperialisme dan sistem memeras (*uitbuitingssysteem*) membikin kacau-balaunya dunia lahir dan batin.

Tuan-tuan telah mengerti sendiri bahwa sifat demikian harus kita jauhkan dari pembangunan Negara Indonesia, bahkan Eropa sendiri pada waktu sekarang mengalami krisis rohani yang maha hebat berhubung dengan jiwa rakyat Eropa telah jemu kepada keangkaramurkaan, sebagai akibat semangat perseorangan tersebut.

Dasar susunan negara Sovyet pada masa sekarang, ialah diktatur dari proletariat. Boleh jadi dasar itu sesuai dengan keistimewaan keadaan sosial dari negeri Rusia, akan tetapi dasar pengertian negara itu bertentangan dengan sifat masyarakat Indonesia yang asli.

Lain negara, ialah negara Jerman nasional sosialis sebelumnya menyerah dalam peperangan sekarang. Negara itu berdasar atas aliran pikiran

negara totaliter, “das Ganze der politischen Einheit des Volkes” (*integrate theory*). Prinsip ‘Pimpinan (*Fuhrung*) sebagai Kembang (ein totaler *Fuhrerstaat*) dan sebagai prinsip yang dipakainya juga ialah persamaan darah dan persamaan daerah (*blut und Boden Theorie*) antara pimpinan adat.

Tuan-tuan yang terhormat, dari aliran pikiran sosialis, ialah prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnya cocok dengan aliran pikiran ketimuran.

Kita sekarang meninjau negara Asia, ialah dasar negara Dai Nippon. Negara Dai Nippon berdasar atas persatuan lahir dan batin yang kekal antara Yang Maha Mulia Tenno Heika, negara dan rakyat Nippon seluruhnya. Tenno adalah pusat rohani dari seluruh rakyat. Negara bersandar atas kekeluargaan. Keluarga Tenno yang dinamakan “Koshitsu” ialah keluarga yang terutama.

Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai pulka dengan corak masyarakat Indonesia.

Setelah kita meninjau dengan ringkas contoh-contoh dari sifat negeri-negeri lain, mak tadi dengan sepatah dua patah kata kami mengatakan apa yang tidak sesuai dan apa yang sesuai dengan lembaga sosial (struktur sosial) dari masyarakat Indonesia yang asli. Sebagai tuan-tuan telah mengetahui juga, struktur sosial Indonesia yang asli tidak lain ialah ciptaan kebudayaan Indonesia, ialah aliran pikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia.

Maka semangat kebatinan, struktur kerohanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya. Segala manusia sebagai seseorang, golongan manusia dalam sesuatu masyarakat dan golongan-golongan lain dari masyarakat itu dan tiap-tiap masyarakat dalam pergaulan hidup di dunia seluruhnya dianggapnya mempunyai tempat dan kewajiban hidup (*darma*) sendiri-sendiri menurut kodrat alam dan segalagalanya ditujukan kepada keseimbangan lahir dan batin. Manusia sebagai seseorang tidak terpisah dari seseorang lain atau dari dunia luar, golongan-golongan manusia, malah segala golongan makhluk, segala sesuatu bercampur-baur dan bersangkutan-paut, segala sesuatu berpengaruh-pengaruhi dan kehidupan mereka bersangkutan-paut. Inilah ide totaliter, ide integralistik dari bangsa Indonesia, yang berwujud juga dalam susunan tatanegara yang asli.

Menurut sifat tatanegara Indonesia yang asli, yang sampai zaman sekarang pun masih dapat terlihat dalam suasana desa baik di Jawa, maupun di Sumatera dan kepulauan-kepulauan Indonesia lain, maka para pejabat negara ialah yang bersatu-jiwa dengan rakyat dan para pejabat negara senantiasa berwajib memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya.

Kepala desa atau kepala rakyat berwajib menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat, harus senantiasa memberi bentuk (*Gestaltung*) kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Oleh karena itu, kepala rakyat ‘memegang adat’ (kata pepatah Minangkabau) senantiasa memperhatikan segala gerak gerik dalam masyarakatnya dan untuk maksud itu, senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desanya, agar supaya pertalian batin antara pemimpin dan rakyat seluruhnya senantiasa terpelihara.

Dalam suasana persatuan antara rakyat dan pemimpinnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong royong, semangat kekeluargaan.

Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (Staatsidee) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun.

Menurut aliran pikiran ini, Kepala Negara dan badan-badan pemerintah lain harus bersifat pemimpin yang sejati, petunjuk jalan ke arah cita-cita luhur, yang diidam-idamkan oleh rakyat. Negara harus bersifat 'badan penyelenggara', badan pencipta hukum yang timbul dari hati sanubari rakyat seluruhnya. Dalam pengertian ini, menurut teori ini yang sesuai dengan semangat Indonesia yang asli, negara tidak lain ialah seluruh masyarakat atau seluruh rakyat Indonesia sebagai persatuan yang *teratur* dan *tersusun*.

Dalam pengertian ini, negara tidak bersikap atau bertindak sebagai seseorang yang maha kuasa, yang terlepas dari seseorang-seseorang manusia dalam daerahnya dan yang mempunyai kepentingan sendiri, terlepas dari kepentingan warga-warga negaranya sebagai seseorang (paham individualis).

Tuan-tuan yang terhormat, menurut pengertian 'Negara' yang integralistik, sebagai bangsa yang teratur, sebagai persatuan rakyat yang tersusun, maka pada dasarnya tidak akan ada dualisme 'staat dan individu', tidak akan ada pertentangan antara susunan staat dan susunan hukum individu, tidak akan ada dualisme 'Staat und staatsfreie Gessellschaft', tidak akan membutuhkan jaminan Grund und Freiheitsrechte dari individu contra Staat, oleh karena individu tidak lain ialah suatu bagian organik dari staat, yang mempunyai kedudukan dan kewajiban tersendiri untuk turut menyelenggarakan kemuliaan Staat, dan sebaliknya oleh karena Staat bukan suatu badan kekuasaan atau raksasa politik yang berdiri di luar lingkungan suasana kemerdekaan seseorang.

Paduka Tuan Ketua, seorang filosof Inggris bernama Jeremy Bentham (akhir abad ke-18) mengajarkan, bahwa Staat menuju kepada 'the greatest happiness of the greatest number' akan tetapi pikiran ini berdasar atas pikiran individualisme. Menurut aliran pikiran tentang negara yang saya anggap sesuai dengan semangat Indonesia asli tadi, negara tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, pun tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat (golongan politik atau ekonomi yang paling kuat), akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala seseorang, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat seluruhnya.

Tuan-tuan yang terhormat, hendaknya jangan salah paham, teori negara integralistik atau negara totaliter ini tidak berarti bahwa negara tidak akan memperhatikan adanya golongan-golongan sebagai golongan, atau tidak akan mempedulikan manusia sebagai seseorang. Bukan itu maksudnya! Aliran pikiran ini mempunyai sifat concrete dan reel, tidak mengabstracheer segala keadaan (seperti sifat teori individualisme).

Negara akan mengakui dan menghormati adanya golongan-golongan dalam masyarakat yang nyata, akan tetapi segala seseorang dan segala golongan akan insyaf kepada kedudukannya sebagai bagian organik dan negara seluruhnya, berwajib meneguhkan persatuan dan harmoni antara segala bagian-bagian itu.

Negara persatuan tidak berarti, bahwa negara atau pemerintah akan menarik segala kepentingan masyarakat ke dirinya untuk dipelihara sendiri, akan tetapi menurut alasan-alasan yang 'doelmatig' akan membagi-bagi kewajiban negara kepada badan-badan pemerintah di pusat dan di daerah masing-masing atau akan memasrahkan sesuatu hal untuk dipelihara oleh sesuatu golongan atau sesuatu orang, menurut masa, tempat dan soalnya.

Paduka tuan ketua, setelah saya menguraikan dasar-dasar, yang menurut hemat saya hendak dipakainya untuk membangunkan Negara Indonesia, maka saya sekarang hendak menguraikan konsekuensi dari teori negara tersebut terhadap pada soal-soal:

1. Perhubungan negara dan agama.
2. Cara bentukan pemerintahan.
3. Perhubungan negara dan kehidupan ekonomi.

Sebelum saya membicarakan soal-soal ini, saya mengingatkan dahulu kepada tuan-tuan, bahwa bukan saja negara yang berdasar persatuan itu akan sesuai dengan corak masyarakat Indonesia, akan tetapi negara yang bersifat persatuan itu telah menjadi cita-cita pergerakan politik Indonesia pada zaman dahulu sampai sekarang.

Saya hendak memperingatkan kepada tuan-tuan pasal 2 dari Panca Dharma yang telah diterima oleh Chuoo Sangi-in, ialah bahwa kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, jadi cita-cita ini tepat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia yang asli.

Bagaimanakah dalam negara yang saya gambarkan tadi akan perhubungan antara negara dan agama?

Oleh anggota yang terhormat tuan Moh. Hatta telah diuraikan dengan panjang-lebar, bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Memang di sini terlihat ada dua paham, ialah: paham dari anggota-anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagai telah dianjurkan oleh tuan Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan, bukan negara Islam. Apa sebabnya di sini saya mengatakan 'bukan negara Islam?' Perkataan: 'negara Islam', lain artinya daripada perkataan 'Negara berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam'. Apakah perbedaannya akan saya terangkan. Dalam negara yang tersusun sebagai 'negara Islam' negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Negara dan agama ialah satu, bersatu padu.

Islam, sebagaimana tuan-tuan telah mengetahui, ialah suatu sistem agama, sosial dan politik, yang bersandar atau Qur'an sebagai pusat sumber dari segala susunan hidup manusia Islam.

Telah diuraikan, bahwa negara Turki sekarang kita melihat lagi contoh-contoh dari negara-negara lain sebelumnya tahun 1924 Maseh, ialah

negara Islam semata-mata. Semenjak tahun 1924 Turki mengganti sifat negaranya dan bukan menjadi negara Islam lagi. Betul agama rakyat Turki ialah Islam, akan tetapi sebagai negara, menurut sistem pemerintahannya, Turki bukan negara Islam lagi. Akan tetapi negeri Mesir, Irak, Iran, Saudi Arabia, ialah negeri-negeri Islam.

Apakah kita hendak mendirikan negara Islam di Indonesia? Tadi saya mengingatkan anjuran dari pemerintah, bahwa kita jangan meniru belaka contoh-contoh dari negara lain, akan tetapi hendaklah tuan-tuan mengingat kepada keistimewaan masyarakat Indonesia yang nyata. Dengan ini saya hendak mengingatkan kepada tuan-tuan, bahwa menurut letaknya Indonesia di dunia, Indonesia mempunyai sifat yang berlainan dengan geografi negeri-negeri Irak, Iran, Mesir atau Syiria, negara-negara yang bersifat ke-Islaman (*Corpus Islamicum*).

Indonesia berada di Asia Timur dan akan menjadi anggota dari lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Dari lingkungan itu anggota yang lain-lain, misalnya negeri Nippon, Tiongkok, Manchuko, Filipina, Thai, Birma, ialah bukan negara Islam. Betul peristiwa itu bukan suatu alasan yang dengan sendirinya harus menolak pembentukan negara Indonesia sebagai negara Islam, itu bukan. Tetapi itu sesuatu faktor penting yang harus diperingati juga.

Saya hendak mengingatkan juga kepada tuan-tuan, bahwa di negara-negara Islam sendiri pun, misalnya di negara Mesir, Iran dan Irak sampai sekarang masih ada beberapa aliran pikiran yang mempersoalkan cara bagaimanakah menyesuaikan hukum syariah dengan kebutuhan internasional, dengan kebutuhan modern, dengan aliran zaman sekarang.

Tadi saya mengatakan, bahwa dalam negara Islam, negara tidak bisa dipisah-pisahkan dari agama, dan hukum syariah itu dianggap sebagai perintah Tuhan untuk menjadi dasar, untuk dipakai oleh negara. Dalam negara-negara Islam, misalnya di negeri Mesir dan lain-lain yang menjadi soal ialah apakah hukum syariah dapat dan boleh dirubah, diganti, disesuaikan menurut kepentingan internasional, menurut aliran zaman? Ada suatu golongan yang terbesar yang mengatakan, bahwa itu tidak diperbolehkan tetapi ada lagi golongan yang mengatakan: bisa disesuaikan dengan zaman baru. Umpamanya saja seorang ahli agama terkenal, yaitu Kepala dari sekolah tinggi Al-Azhar di kairo Muhammad Abduh, yang termasyhur namanya—dan ia mempunyai murid di sini juga—mengatakan: “Memang hukum syariah bisa dirubah dengan cara *ijma'*, yaitu permusyawaratan, asal saja tidak bertentangan dengan Qur'an dan dengan Hadith. Ada lagi yang mempunyai pendirian yang lebih radikal, seperti Ali Abdur Raziq, yang mengatakan, bahwa agama terpisah daripada hukum yang mengenai kepentingan negara. Dengan pendek kata, dalam negara-negara Islam masih ada pertentangan pendirian tentang bagaimana seharusnya bentuk hukum negara, supaya sesuai dengan aliran zaman modern, yang meminta perhatian dari negara-negara yang turut berhubungan dengan dunia internasional itu. Jadi seandainya kita di sini mendirikan negara Islam, pertentangan pendirian itu akan timbul juga di masyarakat kita dan barangkali Badan Penyelidik ini pun akan susah memperbincangkan soal itu. Akan tetapi, tuan-tuan yang terhormat, akan mendirikan negara Islam di Indonesia berarti,

tidak akan mendirikan negara persatuan. Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang akan mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar, yaitu golongan Islam. Jikalau di Indonesia didirikan negara Islam, maka tentu akan timbul soal-soal 'minderheden', soal golongan agama yang kecil-kecil, golongan agama Kristen dan lain-lain. Meski pun negara Islam akan menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan golongan-golongan lain itu, akan tetapi golongan-golongan agama kecil itu tentu tidak bisa mempersatukan dirinya dengan negara. Oleh karena itu cita-cita negara Islam itu tidak sesuai dengan cita-cita negara persatuan yang telah diidam-idamkan oleh kita semuanya dan juga yang telah dianjurkan oleh Pemerintah Balatentara.

Oleh karena itu saya menganjurkan dan saya mufakat dengan pendirian yang hendak mendirikan negara nasional yang bersatu dan arti totaliter seperti yang saya uraikan tadi, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar, akan tetapi yang akan mengatasi segala golongan, baik golongan yang besar maupun golongan yang kecil. Dengan sendirinya dalam negeri nasional yang bersatu itu, urusan agama akan terpisah dari urusan negara dan dengan sendirinya dalam negara nasional yang bersatu itu urusan agama akan diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan. Dan dengan sendirinya dalam negara sedemikian seseorang akan merdeka memeluk agama yang disukainya. Baik golongan agama yang terbesar, maupun golongan yang terkecil, tentu akan merasa bersatu dengan negara (dalam bahasa asing 'zal zich thuis voelen' dalam negaranya).

Hadirin yang terhormat!

Negara nasional yang beratu itu tidak berarti, bahwa negara itu akan bersifat 'a-religieus'. Itu bukan. Negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur, akan mengang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka negara demikian itu dan hendaknya Negara Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga oleh agama Islam.

Sebagai contoh, dalam Negara Indonesia itu hendaknya dianjurkan, supaya para warga-negara cinta kepada tanah air, ikhlas akan diri sendiri dan suka berbakti kepada tanah air, supaya mencintai dan berbakti kepada pemimpin dan kepada negara; supaya mencintai dan berbakti kepada pemimpin dan kepada negara; supaya takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Itu semuanya harus dianjurkan, harus dipakai sebagai dasar moral dari negara nasional yang bersatu itu. Dan saya yakin, bahwa dasar-dasar itu dianjurkan oleh agama Islam.

Sekarang saya akan membicarakan soal yang berhubungan dengan bentuk susunan negara. Apakah negara persatuan (eenheidsstaat) atau negara serikat (bondstaat) atau negara persekutuan (federatie)?

Dengan sendirinya negara secara federasi kita tolak, karena dengan mengadakan federasi itu, bukanlah mendirikan satu negara, tetapi beberapa negara. Sedang kita hendak mendirikan satu negara. Jadi tinggal membicarakan 'eenheidsstaat' atau 'bondstaat'. Jika benar bahwa bondstaat itu juga satu negara belaka, maka lebih baik kita tidak memakai etiket 'eenheidsstaat' atau 'bondstaat', oleh karena perkataan-perkataan itu menimbulkan salah paham. Sebagai telah diuraikan oleh anggota yang terhormat tuan Moh. Hatta, maka

dalam negara itu soal sentralisasi atau desentralisasi pemerintahan tergantung daripada masa, tempat dan soal yang bersangkutan. Maka dalam Negara Indonesia yang berdasar pengertian negara integralistik itu, segala golongan rakyat, segala daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri, akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri-sendiri, sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. Soal pemerintahan apakah yang akan diurus oleh pemerintahan pusat dan soal apakah yang akan diurus oleh pemerintah daerah, baik daerah besar maupun daerah kecil, itu semuanya akan tergantung daripada 'doelmatigheid' berhubungan dengan waktu, tempatnya dan juga soalnya.

Misalnya soal ini, pada masa ini dan pada tempat ini, lebih baik diurus oleh pemerintah daerah, sedangkan soal itu, pada masa lalu itu dan tempat itu lebih baik diurus oleh pemerintah pusat. Jadi dalam negara totaliter atau integralistik, negara akan ingat kepada segala keadaan, hukum negara akan memperhatikan segala keistimewaan dari golongan-golongan yang bermacam-macam adanya di tanah air kita itu. Dengan sendirinya dalam negara yang terdiri atas pulau-pulau yang begitu besar, banyak soal-soal pemerintahan yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Sekian tentang bentuk susunan negara.

Sekarang tentang soal: republik atau monarchi?

Tuan-tuan yang terhormat! Menurut hemat saya soal republik atau monarchi itu tidak mengenai dasar susunan pemerintahan. Yang penting ialah, hendaknya Kepala Negara, bahkan semua badan pemerintahan mempunyai sifat pemimpin negara dan rakyat seluruhnya.

Kepala negara harus sanggup memimpin rakyat seluruhnya. Kepala negara harus mengatasi segala golongan dan bersifat mempersatukan negara dan bangsa. Apakah kepala negara itu akan diberi kedudukan sebagai Raja atau Presiden atau sebagai Adipati seperti di Birma, atau sebagai 'Führer', itu semuanya tidak mengenai dasar susunan pemerintahan. Baik Raja atau Presiden atau Führer, atau Kepala Negara yang bergelar ini atau itu, misalnya bergelar "Sri Paduka yang Dipertuan Besar" atau bergelar lain, ia harus menjadi pemimpin negara yang sejati. Ia harus bersatu jiwa dengan rakyat seluruhnya.

Apakah kita akan mengangkat seorang sebagai Kepala Negara dengan hak turun-temurun, atau hanya untuk waktu yang tertentu, itulah hanya mengenai bentuk susunan pimpinan negara yang nanti akan kita selidiki dalam badan ini. Caranya mengangkat pemimpin negara itu hendaknya janganlah diturut cara pilihan menurut sistem demokrasi Barat, oleh karena pilihan secara sistem demokrasi Barat itu berdasarkan atas paham perseorangan.

Tuan-tuan sekalian hendaknya insaf kepada konsekwensi dari pendirian menolak dasar perseorangan itu. Menolak dasar individualisme berarti menolak juga sistem parlementarisme, menolak sistem demokrasi Barat, menolak sistem yang menyamakan manusia satu sama lain seperti angka-angka belaka dan semuanya sama harganya.

Untuk menjamin supaya pimpinan negara terutama Kepala Negara terus menerus bersatu jiwa dengan rakyat, dalam susunan pemerintahan Negara Indonesia, harus dibentuk sistem badan permusyawaratan. Kepala Negara akan terus bergaulan dengan Badan Permasyarakatan supaya senantiasa mengetahui dan merasakan rasa keadilan rakyat dan cita-cita rakyat. Bagaimana akan

bentuknya Badan Permusyawaratan itu, ialah satu hal yang harus kita selidiki, akan tetapi hendaknya jangan memakai sistem individualisme. Bukan saja Kepala Negara, akan tetapi pemerintah daerah pun sampai Kepala daerah yang kecil-kecil, misalnya Kepala Desa, harus mempunyai sifat pemimpin rakyat yang sejati. Memang dalam masyarakat desa yang asli, Kepala Desa mempunyai sifat pemimpin rakyat yang sejati. Kepala Adat atau Kepala Desa menyelenggarakan kehendak rakyat, senantiasa memberi Gestaltung kepada keinsyafan keadilan rakyat. Jika Kepala Negara Indonesia akan bersifat demikian, maka Kepala Negara itu akan mempunyai sifat Ratu Adil, seperti yang diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sekarang tentang perhubungan antara negara dan perekonomian. Dalam negara yang berdasar integralistik, yang berdasar persatuan, maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistem 'sosialisme negara' (staatsocialisme). Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh negara sendiri, akan tetapi pada hakekatnya negara yang akan menentukan di mana dan di masa apa dan perusahaan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah atau yang akan diserahkan kepada sesuatu badan hukum prive atau kepada seseorang, itu semua terghantung daripada kepentingan negara, kepentingan rakyat seluruhnya. Dalam negara Indonesia baru, dengan sendirinya menurut keadaan sekarang, perusahaan-perusahaan sebagai lalu lintas, electriciteit, perusahaan alas rimba harus diurus oleh negara sendiri. Begitu pun tentang hal tanah. Pada hakekatnya negara yang menguasai tanah seluruhnya. Tambang-tambang yang penting untuk negara akan diurus oleh negara sendiri. Melihat sifat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pertanian, maka dengan sendirinya tanah pertanian menjadi lapangan hidup dari kaum tani dan negara harus menjaga supaya tanah pertanian itu tetap dipegang oleh kaum tani.

Dalam lapangan ekonomi, negara akan bersifat kekeluargaan juga oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat Timur, yang harus kita pelihara sebaik-baiknya. Sistem tolong-menolong, sistem kooperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesia.

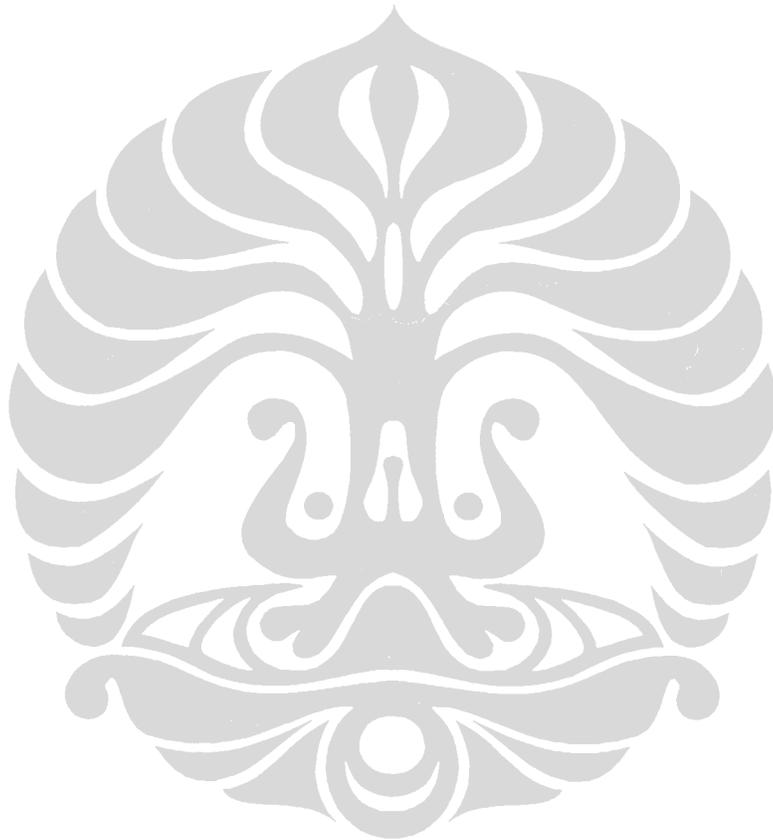
Dasar totaliter dari negara kebangsaan yang satu itu mempunyai akibat-akibat pula dalam lapangan-lapangan lain, akan tetapi akan kepanjangan, jikalau saya membicarakan soal-soal dari lapangan-lapangan lain itu.

Sekian saja paduka tuan ketua, tentang dasar-dasar yang hendaknya dipakai untuk mendirikan Negara Indonesia Merdeka. Atas dasar pengertian negara sebagai persatuan bangsa Indonesia yang tersusun atas sistim hukum yang bersifat integralistik tadi di mana negara akan berwujud dan bertindak sebagai penyelenggara keinsyafan keadilan rakyat seluruhnya, maka kita akan dapat melaksanakan Negara Indonesia yang bersatu dan adil, seperti sudah termuat dalam Panca Dharma, pasal 2 yang berbunyi: "Kita mendirikan Negara Indonesia, yang (makmur, bersatu, berdaulat) adil". Maka negara hanya bisa adil, jikalau negara itu menyelenggarakan rasa keadilan rakyat dan menuntun rakyat kepada cita-cita yang luhur, menurut aliran zaman. Negara Indonesia yang berdasarkan semangat kebudayaan Indonesia yang asli, dengan sendirinya akan bersifat Negara Asia Timur Raya. Dan Negara Indonesia yang terbentuk atas aliran pikiran persatuan yang saya uraikan tadi, pun akan dapat

menjalankan dharma (kewajibannya) dengan semestinya sebagai anggota daripada kekeluargaan Asia Timur Raya.

Terimakasih!

Sumber: Bahar, Saafroedin, dkk (editor). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) & Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 22 Mei 1945 – 22 Agustus 1945. Ed. III, Cet. I. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1985. Hal. 31-43



Ali Moertopo:
“Sejarah Politik Nasional”

Sekilas lintas dapat ditelaah kembali sejarah bangsa dan negara selama 25 tahun sejak kemerdekaannya.

1945-1950

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 diletakkan dasar ideologi Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni ketika diterima dan disepakati bersama Pembukaan UUD 1945, Batang-Tubuh, beserta penjelasannya. Sejak itu bangsa Indonesia tahu dasar berpijaknya dan tahu apa tujuan yang akan dicapai. Selama jangka waktu lima tahun pertama kemerdekaan, dengan persatuan yang bulat bangsa Indonesia berjuang dan mengangkat senjata, dengan berkorban tetapi dengan penuh keikhlasan dan kemurnian tujuan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pecahnya pemberontakan komunis di Madiun tahun 1948 berusaha menghentikan atau menyelewengkan cita-cita bangsa.

Namun demikian, perjuangan yang mahal ini berhasil dimenangkan dan akhirnya kedaulatan bangsa dan negara Indonesia yang diperjuangkan secara fisik dengan pengorbanan yang besar itu mendapat pengakuan dunia.

1950-1959

Setelah penyelewengan ke arah Negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS) diluruskan kembali dengan terbentuknya Negara Kesatuan, bangsa Indonesia masih tergodanya untuk menerapkan sistem Demokrasi Liberal. Sistem ini telah membuka peluang bagi komunisme untuk timbul kembali dan telah membuka kemungkinan timbulnya bermacam-macam pemberontakan, serta menimbulkan kemacetan dalam Konstituante dan mengakibatkan pergantian-pergantian kabinet setiap tahun. Kestabilan politik tidak berhasil diciptakan sehingga keadaan ekonomi dan pembangunan terbengkalai.

1959-1965

Berlakunya kembali UUD 1945 yang didekritkan pada tanggal 5 Juli 1959 merupakan suatu titik terang dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia, namun demikian pelaksanaannya jauh dari konsekuen.

Pancasila dan UUD 1945 dijadikan semboyan kosong belaka, dan sebagai gantinya diisi dengan Nasakom. Demokrasi yang harus dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dijadikan Demokrasi Terpimpin, kedaulatan yang ada di tangan rakyat diganti oleh suara ‘penyambung lidah rakyat’, Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum dibubarkan, kebebasan pers ditiadakan, hukum konstitusional diganti oleh hukum revolusi, presiden diangkat oleh hukum revolusi, kekuasaan MPRS berpindah ke tangan ‘pemimpin besar revolusi’, prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dikhianati oleh politik konfrontasi dan politik bebas aktif dijadikan politik luar negeri berporos Jakarta-Peking-Pyongyang.

Tidak mengherankan bahwa dalam keadaan serupa ini PKI dapat berkembang dengan pesat sehingga mencetuskan “Gerakan 30 September” yang dimaksudkan untuk membawa Negara Pancasila ke arah Negara Komunis.

Periode Orde Baru

...dengan latar belakang ini, dapat dimengerti mengapa Orde Baru mendesak penerapan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, dan mengapa koreksi total ideologi, politik dan pemerintahan, hukum, sosial dan pendidikan diperlukan.

Dengan latar belakang tanggapan historis ini dapat dimengerti mengapa Orde Baru sepakat bahwa yang terpenting dan yang paling pokok adalah perombakan mentalitas yang telah mempolakan tingkah laku. Orde Baru sepakat untuk secara bertahap kembali ke Demokrasi Pancasila, harus mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan atau pribadi, harus kembali kepada semangat kerja yang berorientasi pada program...

Orde Baru lahir dari suatu pertentangan dalam ruang lingkup nasional. Pertentangan ini bersifat pertentangan antara dua aspirasi yang ada dalam tubuh bangsa Indonesia. Sumber pertentangan itu telah ada sebelumnya dan terlihat dari dualisme bahkan pluralisme nasional di segala bidang kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer.

Pertentangan nasional antara dua aspirasi ini diwakili oleh dua kelompok dalam masyarakat yang kemudian dikenal sebagai Orde Lama dan Orde Baru. Ada pun kekuatan Orde Lama itu terpusat sekitar orang-orang yang berideologi komunis dengan tulang punggung PKI beserta ormas-ormasnya, bersama dengan orang-orang yang mengkultuskan individu Presiden Soekarno dan konsep-konsep politik Nasakom, Nefo, Dekon dan sebagainya. Dalam kelompok ini juga termasuk orang-orang oportunis yang hanya berpikiran untuk menggunakan kesempatan-kesempatan guna memperoleh keuntungan secara politis atau pun ekonomis, seperti Karkam dan Aslam.

Sebaliknya kekuatan-kekuatan Orde Baru adalah golongan-golongan serta perorangan yang antikomunis atau nonkomunis beserta organisasi-organisasinya, termasuk pula golongan-golongan ekstrem dan orang-orang yang antikonsepsi politik Bung Karno.

Dualisme yang ada itu berjalan terus hingga pada saat pengukuhan Jendral TNI Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia dalam bulan Maret 1968.

Sumber: Bacaan ini berasal dari ceramah yang disampaikan Brigadir Jendral Ali Moertopo pada kursus upgrading karyawan teras ABRI tingkat pusat yang diselenggarakan di Jakarta antara 20 Agustus dan 17 Oktober 1970. Bacaan berikut diambil dari naskah ‘terbatas’ karya Ali Moertopo yang berjudul Politik Nasional: Strategi, Taktik dan Teknik Implementasinya (1970: 17-20). Bouchier & Hadiz (2006: 58-61)

Ali Moertopo
 “Massa Mengambang”

Dalam masyarakat Indonesia yang umumnya masih tradisional, modernisasi merupakan dan menuntut terjadinya *perubahan dan pembaharuan sistem nilai-nilai*. Dengan demikian modernisasi berarti mengubah norma-norma yang tidak berfungsi lagi dalam perkembangan masyarakat serta norma-norma yang menghambat perkembangan. Perubahan harus terjadi dalam lingkup perubahan integral dan tidak saja terbatas pada perubahan dalam aspek kehidupan sosio-kultural tetapi mencakup pula aspek-aspek teknis, ekonomis, politis dan lain-lainnya. Adalah kenyataan bahwa dalam mengadakan perubahan-perubahan integral, waktu dan kehendak yang terdapat dalam masing-masing aspek tidak selalu berjalan secara sinkron. Hal ini dapat dilihat dari perubahan dalam aspek teknis yang dapat lebih mudah terjadi daripada adat istiadat. Ditinjau dari aspek perubahan sosio kultural, persoalan modernisasi menuntut adanya sikap terbuka terhadap pengaruh dan kebudayaan asing, adanya dukungan yang kuat dari pemimpin-pemimpin yang progresif yang dapat menghidupkan satu etos kemajuan dan semangat bekerja. Semua ini perlu berorientasi pada suatu zaman baru, atau masa depan, dengan meninggalkan idealisasi zaman lampau. Dengan sendirinya proses modernisasi tidak terlepas dari konflik-konflik yang timbul akibat proses ini, dimana norma-norma baru akan berkonflik dengan norma-norma tradisional. Oleh karenanya proses modernisasi memerlukan *perencanaan perubahan sosio kultural, dan perencanaan perubahan secara umum*. Modernisasi sebagai *planned change* harus jelas menentukan arah yang akan dituju. Hal ini meminta penjelasan tentang model negara Pancasila dan penerapan asas-asas Pancasila dalam setiap bidang kehidupan, setiap instansi dan organisasi negara serta meliputi seluruh lapisan masyarakat baik di desa maupun di kota...

Bidang Politik

Antara pola kehidupan politik dan pola kehidupan sosial masyarakat selalu terdapat hubungan jalin menjalin yang sangat erat. Hubungan yang demikian ini selalu menyangkutkan pembicaraan salah satu segi, dengan segi kehidupan lainnya. Dalam kehidupan politik, tujuan yang hendak dicapai adalah penataan kembali kehidupan politik, pengorganisasian kekuatan-kekuatan sosial politik struktur politik dan bersamaan atau berangsur-angsur membina cara berpikir dan mental politik sehingga keadaan sosial politik mantap dan matang untuk mendukung pembangunan masyarakat. Dengan demikian tidak terulang kenyataan dimana pembangunan justru dikorbankan demi kepentingan politik yang sama sekali tidak berimpit dengan kepentingan pembangunan.

Politik dan pembangunan

Didorong oleh cita-cita bangsa sebagaimana dicetuskan dalam cita-cita kemerdekaannya demokrasi Pancasila perlu dikembangkan. Tetapi selalu harus diingat bahwa demokrasi Pancasila bukanlah sekadar tata cara atau mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah perwakilan saja. Tetapi harus merupakan cara berpikir, cara bermusyawarah, dan cara bertindak dengan berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak dan usaha mendapatkan hasil yang

sebaik dan sekaligus sebesar mungkin. Sudah menjadi itikad bangsa untuk menolak gagasan demokrasi liberal yang mendewakan kebenaran formal dengan *majority rule* dan juga menolak demokrasi terpimpin yang memungkinkan kekuasaan mutlak penguasa maupun diktator mayoritas. Kedua bentuk ini telah dialami dalam sejarah kehidupan bangsa dan pada dasarnya merupakan konsekuensi logis tingkat perkembangan masyarakat Indonesia yang jauh dari memadai.

Pada tahap dewasa ini kondisi sosial politik di Indonesia berangsur-angsur telah dapat merumuskan dan menemukan bentuknya yang wajar yang kiranya dapat menanggapi kebutuhan rakyat banyak yang sebagian besar merupakan rakyat petani yang jujur beritikad baik dan sederhana. Oleh karenanya pembinaan politik tidak boleh menjadikan rakyat kacau dan fanatik sempit dalam suatu ideologi kepartaian tertentu tetapi justru mengarah ke sikap terbuka terhadap golongan-golongan lain sebagai partner berdemokrasi dan partner membangun.

Pembinaan politik adalah usaha dan upaya agar rakyat banyak dapat berpartisipasi positif dalam program pembangunan nasional. Kesadaran rakyat dalam bernegara secara kongkrit adalah melalui partisipasi di daerahnya masing-masing, memecahkan persoalan-persoalan yang secara riil dihadapi. Partisipasi yang demikian ini merupakan pelaksanaan program pembangunan nasional yang dimulai dari desa, kabupaten, kota dan propinsi. Secara maksimal partisipasi ini dapat dijalankan melalui kekaryaan, fungsi dan profesinya masing-masing. Bentuk kegiatan ini adalah manifestasi riil dalam usaha-usaha bernegara. Dalam menciptakan kondisi untuk pelaksanaan dan pengembangan usaha-usaha ini DPR dan pemerintah berusaha untuk menyusun Undang-undang otonomi daerah yang riil dan undang-undang perimbangan keuangan pusat daerah yang adil dan wajar, yang sekaligus dapat makin memantapkan integritas nasional dan integritas bangsa yang sedang membangun...

Iklim pembinaan politik yang sehat, dan struktur politik yang berfungsi dengan baik, kedua-duanya adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk menyehatkan kehidupan politik perlu diadakan perubahan struktur politik baik yang berlaku dalam pemerintahan yaitu suprastruktur politik yang masing-masing saling pengaruh mempengaruhi kehidupan politik sebagai keseluruhan.

Setelah dilalui sejarah kehidupan bernegara sejak kemerdekaan hingga sekarang, jelaslah bahwa kehidupan politik yang harus dikembangkan tidak dapat berorientasi pada kekuatan dan kekuasaan melainkan berorientasi pada manusia serta perkembangan kemanusiaan dan kemsyarakatan yang perlu mendapatkan perwujudan dalam penyusunan gagasan-gagasan serta pelaksanaan pembangunan di seluruh bidang kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan sendirinya alam pemikiran yang berorientasi pada program pembangunan harus tertuang dalam pola struktur politik. Infrastruktur politik yang berorientasi pada ideologi golongan tidak sesuai lagi dengan pola yang diperlukan bagi pembangunan. Infrastruktur demikian telah terbukti dalam sejarah bangsa tidak dapat mengemban tuntutan rakyat, sedangkan sudah jelas dari semula bahwa ideologi negara adalah Pancasila.

Kehidupan organisasi-organisasi yang bergerak langsung dalam bidang politik harus mencari bentuk pengaturan yang baru sedemikian sehingga kegiatan politiknya diarahkan terutama kepada partisipasi langsung dalam kehidupan ketatanegaraan. Organisasi politik harus dapat merupakan organisasi yang

konsepsional, memberikan alternatif konsep-konsep yang baik dan benar. Dengan sendirinya, menjadi wajar bahwa dalam pembaharuan struktur politik, organisasi-organisasi politik perlu menyederhanakan dirinya, baik dalam jumlah maupun dalam strukturnya masing-masing. Dengan demikian diharapkan bahwa dalam Pemilu di tahun 1976 yang akan datang hanya terdapat 3 tanda gambar, yakni dua dari kelompok partai, dan satu dari Golkar.

Massa mengambang

Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa, di masa-masa yang lalu rakyat umumnya, lebih-lebih di desa-desa dengan alam pemikirannya yang belum cukup rasional telah banyak terombang-ambing dan terlibat dalam pertentangan-pertentangan politik dan ideologi sempit antara partai-partai politik yang secara sempit berorientasi pada ideologi masing-masing. Partai-partai politik itu senantiasa berusaha menghimpun kekuatan massa melalui pembentukan berbagai organisasi afiliasi atas dasar ideologi partai-partai induknya. Massa rakyat, khususnya di desa-desa selalu menjadi korban kepentingan politik dan kepentingan ideologi partai-partai yang bersangkutan. Terlibatnya mereka dalam pertentangan kepentingan politik dan ideologi sempit telah menyebabkan kepentingan yang menyangkut kehidupan mereka sehari-hari kebutuhannya akan kemajuan dan perbaikan hidup baik material maupun spiritual menjadi terabaikan.

Keadaan semacam ini hendaknya tidak terulang lagi. Oleh karena itu mengingat bahwa, bahkan hingga kini orientasi pada ideologi sempit itu pun belum seluruhnya ditinggalkan oleh partai-partai politik sudah selayaknya bila rakyat yang sebagian besar terdiri atas rakyat di pedesaan dialihkan perhatiannya dari masalah-masalah politik dan ideologi sempit, dan diarahkan kepada usaha pembangunan nasional, antara lain melalui pembangunan masyarakat desanya masing-masing. Untuk itu wajarlah bila kegiatan partai politik dibatasi sampai daerah tingkat II. Di sinilah letak makna dan tujuan dari proses depolitisasi dan deparpolisasi bagi desa-desa.

Meskipun demikian hal ini tidak berarti bahwa rakyat di desa-desa tidak bisa mempunyai aspirasi-aspirasinya sendiri termasuk aspirasi politik. Di samping kesempatan untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi mereka ke arah pembangunan masyarakatnya sendiri dalam pemilihan umum, mereka dapat menentukan pilihan pada golongan-golongan baik partai politik maupun Golkar yang dipandangnya mampu untuk menyalurkan aspirasi mereka, dan yang mempunyai program perjuangan dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi-aspirasi mereka.

Dengan demikian rakyat di desa-desa tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaganya yang berharga untuk melibatkan dirinya dalam kancah perjuangan politik partai dan golongan tetapi menyibukkan diri dalam usaha-usaha pembangunan sehingga didapatlah apa yang dapat disebut sebagai *floating mass*, yang tidak terikat secara permanen dalam keanggotaan sesuatu partai politik. Di samping dapat diarahkan kepada usaha-usaha pembangunan *floating mass* ini akan merupakan dorongan pula bagi kekuatan-kekuatan sosial politik untuk mempersiapkan program pembangunan yang akan ditampilkan dan dinilai dalam pemilihan umum dan golongan yang mempunyai program pembangunan yang menyangkut kepentingan umum akan menang dalam pemilihan umum.

Golkar dan pembaharuan politik

Dalam merumuskan usaha-usaha ke arah pembinaan politik guna tercapainya iklim kehidupan politik yang sehat dan yang tidak hanya dapat mengemban tuntutan pembangunan tetapi yang sekaligus dapat memajukan usaha-usaha pembangunan yang integral, kiranya struktur politik yang dihasilkan oleh pemilihan umum tahun 1971 dapat digunakan sebagai modal atau sekurang-kurangnya sebagai pangkal tolak sekalian usaha tersebut. Dengan modal atau pun pangkal tolak di atas ini tidak segera dapat terwujud iklim politik yang dikehendaki tetapi terjadi melalui suatu proses pembaharuan dan perubahan. Dalam rangka ini telah muncul Golkar sebagai suatu kekuatan yang diharapkan dapat menjadi unsur pembaharu yang mampu membawa iklim politik yang ada kepada bentuk baru sesuai dengan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan pembangunan.

Usaha Golkar ini didukung oleh unsur-unsur pembaharu yang terdiri dari kelompok-kelompok profesi/fungsional, komponen-komponen pegawai negeri, para ahli/sarjana, massa rakyat yang nonpartai serta ABRI sebagai salah satu komponen pembaharuan ini. Sebagai unsur pembaharu, Golkar sendiri tidak terlepas dari proses pembaharuan. Maka jelaslah bahwa struktur politik yang dipolakan demikian akan mengubah dimensi tata gerak unsur-unsur politik, sehingga atas dasar pengertian bahwa politik adalah pengabdian, bentuk kehidupan politik itu makin dapat ditata selaraskan kepada bentuk-bentuk kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan sosial. Semakin bentuk-bentuk itu mendekat semakin tepat struktur politik itu...

Institusi, komunikasi dan media massa

Masyarakat berfungsi melalui bentuk-bentuk perserikatan, perhimpunan, institusi maupun kelompok-kelompok kesatuan lainnya, baik dalam tata ruang kota maupun desa. Perbedaan fungsi kota dan desa memberi corak berbeda pula dalam kehidupan institusionalisasi di kota dan di desa, satu dan lain juga akibat kondisi sosio kultural yang berbeda. Bila di desa bentuk-bentuk pengaturan masyarakat masih sangat terikat pada pola-pola kehidupan agraris, di kota makin hari makin dikenal tuntutan-tuntutan baru yang pada gilirannya dirumuskan demi berhasilnya pembangunan nasional. Pembangunan menuntut terjadinya pengelompokan yang lebih riil, lebih efektif dan lebih efisien, dan telah merupakan konsensus nasional bahwa titik berat dalam institusionalisasi masyarakat yang sedang membangun adalah pengelompokan berdasarkan kekarayaan atau profesi. Dalam bentuk inilah kiranya masyarakat menyelenggarakan partisipasinya tanpa melupakan hakikatnya sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Latar belakang yang terlampau bersimpangsiur, orientasi yang tidak memenuhi tuntutan zaman seperti yang masih banyak berlaku di Indonesia-dimana formalitas lebih dipentingkan daripada fungsinya- menyebabkan demokrasi tidak pernah berfungsi dengan baik. Penataan ulang institusi masyarakat seiring kemajuan zaman tidak berkembang dengan otomatis, terutama apabila hal itu dihasilkan oleh persilangan dengan kebudayaan lain seperti halnya kehidupan kepartaian yang merupakan bentuk pengaturan yang dikenal dari masyarakat Barat.

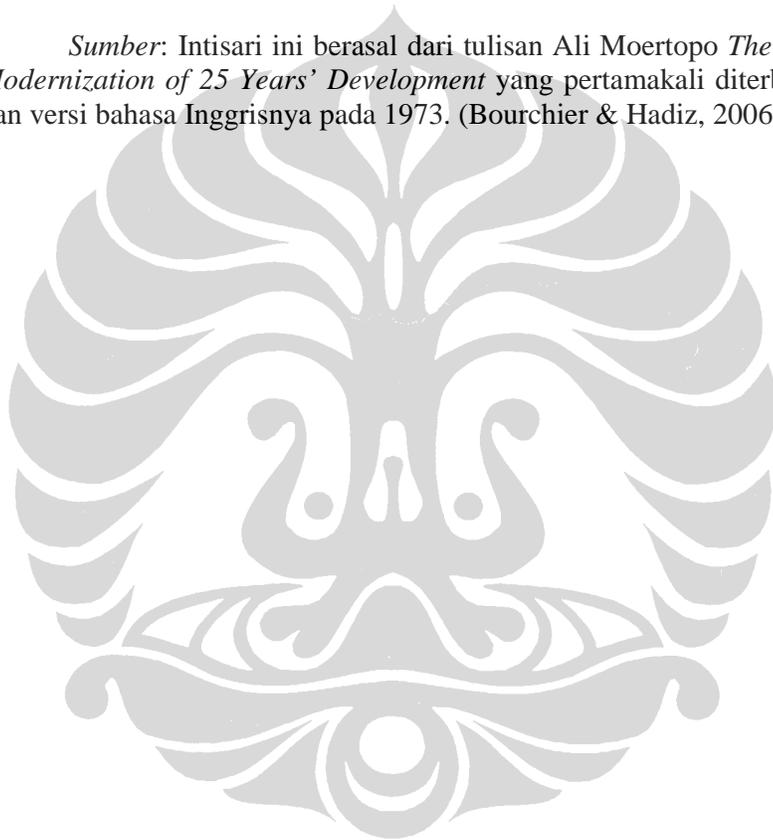
Bentuk pengaturan ini menuntut latar belakang pemikiran dan tingkah laku tertentu yang ternyata jarang berimpit dengan kondisi masyarakat Indonesia. Oleh karenanya pengolahan merupakan proses yang tidak mengenal akhir, selalu berjalan

dan dipertimbangkan berdasarkan perkembangan kondisi intrinsik masyarakat serta pengaruh-pengaruh ekstrinsik tersebut.

Pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan dalam modernisasi dapat dianggap merupakan spesialisasi-spesialisasi. Pada dasarnya pergeseran pengelompokan ke arah ini telah terjadi dalam masyarakat Indonesia dari bentuk *paguyuban* ke arah *patembayan*. Perubahan ini mengakibatkan bahwa kebutuhan manusia sehari-hari tidak perlu lagi dikerjakan oleh anggota keluarga sendiri. Telah timbul pembagian-pembagian kerja pada sektor-sektor primer sampai pada sektor jasa-jasa.

Perubahan situasi ini perlu mendapatkan bentuknya dalam segala bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politis.

Sumber: Intisari ini berasal dari tulisan Ali Moertopo *The Acceleration and Modernization of 25 Years' Development* yang pertamakali diterbitkan pada 1972, dan versi bahasa Inggrisnya pada 1973. (Bourchier & Hadiz, 2006: 61-67)



Abdul Kadir Besar:
“Negara Kekeluargaan”

UUD1945 menganut *staatsidee* kekeluargaan. Inilah yang menjadi pangkal tolak dari sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Suatu sistem pemerintahan itu terwujud dalam pembagian kekuasaan antar lembaga-lembaga negara (yang merupakan bagian-bagian dari sistem) dan hubungan kekuasaan (yang merupakan hubungan fungsional antar bagian) antar lembaga negara yang bersangkutan ...

Negara Republik Indonesia mendasarkan diri pada paham kedaulatan rakyat, lazim disebut demokrasi. Adalah bahwa *rakyatlah yang berdaulat* dan oleh karena itu penyelenggara pemerintahannya didasarkan pada kehendak rakyat. Konkretisasi esensi demokrasi ini, di berbagai negara demokrasi di dunia, tidak selalu sama, dalam negara yang satu berbeda dari negara yang lain, tergantung dari *staatsidee* yang dianut di negara-negara yang bersangkutan.

UUD 1945 menganut *staatsidee* kekeluargaan (yang dalam ilmu negara dikenal dengan istilah teori integralistik), yaitu suatu pengertian tentang negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan yang ada dalam segala lapangan kehidupan. (Soepomo dalam Yamin 1959:113)

Prinsip-prinsip yang dikandung dalam *staatsidee* kekeluargaan adalah: prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara, dan hal ini seluruhnya sesuai dengan aliran pikiran ketimuran (termasuk Indonesia).

Struktur kerohanian bangsa Indonesia yang dilatarbelakangi psikologi dan sosiologi masyarakat agraris, berkecenderungan kuat akan persatuan hidup, mula-mula di lingkungan keluarga sendiri dan karena desakan kebutuhan, meluas dalam lingkungan masyarakat hukumnya untuk menghadapi bahaya dan tantangan alam. Oleh karena bahaya dan tantangan alam itu tidak dapat diperhitungkan mengenai bentuk, intensitas dan waktu terjadinya, maka tolong menolong yang diperlukannya juga tidak dapat diperhitungkan secara rasional, dan sebagai konsekuensinya tidak melahirkan suatu mental hitung-menghitung untung rugi secara proporsional.

Dari lembaga tolong menolong dan gotong royong tersebut lahir suatu filsafat hidup seperti yang dilukiskan oleh Prof. Soepomo bahwa, ‘manusia sebagai seseorang tidak terpisah dari yang lain atau dari dunia luar, golongan-golongan manusia, malah segala golongan makhluk, segala sesuatu bercampur baur dan bersangkut paut.’

Staatsidee kekeluargaan membawa konsekuensi pada pengertian kehendak rakyat, yaitu bahwa yang dimaksud dengan kehendak rakyat adalah kehendak dari seluruh rakyat, mencakup segenap aspirasi sosial-politik yang hidup di kalangan rakyat, kepentingan daerah dan kepentingan golongan, bukan kehendak mayoritas rakyat saja seperti halnya dalam negara demokrasi berdasarkan *staatsidee* individualisme dan bukan kehendak minoritas saja yang mengatasnamakan kolektivitas seperti halnya dengan negara-negara totaliter berdasarkan *staatsidee* kelas...

Negara Republik Indonesia yang menganut paham bahwa kehendak rakyat adalah kehendak dari *seluruh* rakyat, keanggotaan lembaga tersebut yaitu MPR harus mencerminkan *penjelmaan seluruh rakyat*. Dalam terminologi *staatsidee* kekeluargaan berarti bahwa segenap anggota keluarga Bangsa Indonesia harus ada dalam MPR.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya, maka yang dimaksud dengan ‘anggota keluarga’ adalah *golongan politik* yaitu segenap anggota DPR..., *golongan daerah* dan *golongan karya* yang dua terakhir menurut UUD 1945 diberi sebutan ‘utusan’ yang berarti tidak perlu dipilih lewat pemilihan umum. Golongan-golongan yang secara kualitatif nyata berfungsi terhadap kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan seperti misalnya cendekiawan, tani, buruh, angkatan bersenjata dan sebagainya tetapi sekadar karena jumlah penduduknya/anggotanya tidak atau kurang mencukupi persyaratan kosien-pemilihan tidak terjamin mempunyai wakil dalam MPR.

Kemutlakan adanya utusan-utusan daerah dan utusan-utusan golongan dalam MPR adalah konsekuensi dari *staatsidee* kekeluargaan yang dianut oleh UUD 1945...

Berdasarkan *staatsidee* kekeluargaan maka dalam kehidupan kenegaraan Indonesia hanya ada satu rumusan kehendak rakyat dan dilembagakan menjadi garis-garis besar haluan negara (disingkat GBHN), dan untuk merumuskan serta menetapkan GBHN tersebut perlu dipenuhi dua syarat, yaitu: *qua forum* harus yang mencerminkan penjelmaan seluruh rakyat, dalam hal ini adalah MPR karena keanggotaannya telah mencakup seluruh ‘anggota keluarga’ yaitu golongan politik, golongan daerah dan golongan karya; *qua cara* mengambil keputusan dalam menetapkan GBHN haruslah dengan mufakat bulat karena apabila sekadar dengan keputusan suara mayoritas berarti ada kehendak dari minoritas rakyat yang tidak masuk dalam GBHN yang pada gilirannya berarti GBHN *bukan* merupakan kehendak *seluruh* rakyat, hal mana bertentangan dengan pengertian ‘kehendak rakyat’ berdasarkan *staatsidee* kekeluargaan, melainkan sama dengan pengertian ‘kehendak rakyat’ berdasarkan *staatsidee* individualisme.

Para pembuat UUD 1945, dengan sadar tidak mendasarkan sistem pemerintahan yang hendak disusun dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dari Montesquieu, karena dari teori tersebut dianggap sebagai bagian daripada paham demokrasi liberal.

Sebaliknya, oleh karena *staatsidee* yang dipilih oleh para pembuat UUD 1945 adalah kekeluargaan, maka sistem pemerintahannya didasarkan pada teori pembagian kekuasaan (*division of power*), dimana antar lembaga-lembaga negara tertinggi meskipun masing-masing melaksanakan kekuasaan tertentu, dimungkinkan untuk saling kerjasama, yang menurut Prof. Supomo dikatakan bahwa UUD kita *bersistem sendiri*.

Sumber: Intisari ini diambil dari dokumen setebal 55 halaman yang ditulis ketika Kolonel Abdul Kadir Besar menjabat Sekretaris Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Dokumen itu sendiri bertanggal 18 April 1968, tetapi dikutip sebagai sumber sejak 1969. Versi ini diambil dari Besar, 1972: 493-501. (Direproduksi dalam Bouchier & Hadiz, 2006: 56-58)

Soeharto:

“Hak Demokrasi jangan digunakan sebagai kedok”

Adanya perbedaan pendapat di Indonesia memang sangat tidak terelakkan, asalkan semuanya tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh kebutuhan untuk mempertahankan keharmonisan yang demokratis. Perbedaan adalah bumbu demokrasi. Namun perbedaan-perbedaan itu harus dijaga agar tetap berada dalam batas keharmonisan yang demokratis. Rakyat tidak boleh menggunakan hak-hak demokrasi mereka jika akhirnya malah menghasilkan kondisi yang tidak demokratis. Tampaknya hal yang demikian ini sedang terjadi di Indonesia, khususnya dalam hubungan dengan proyek Taman Mini Indonesia Indah.

Sebenarnya memang sangat wajar bahwa perbedaan pendapat akan muncul dalam hubungan dengan proyek ini. Namun perbedaan-perbedaan ini semestinya tidak diperbesar sampai ke titik yang membahayakan demokrasi itu sendiri. Konflik antara kelompok yang pro dan kontra dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan ketertiban publik dan mengganggu stabilitas nasional. Hal ini akan melahirkan hambatan bagi pembangunan...

Proyek Taman Mini Indonesia Indah memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, keluar ditunjukkan untuk menjadi alat komunikasi, untuk memperkenalkan Indonesia kepada bangsa-bangsa lain, untuk menunjukkan kepada mereka cita-cita yang sesungguhnya dari perjuangan rakyat Indonesia, dan sifat Pancasila, yang mencerminkan falsafah hidup mereka. Sebagaimana telah saya katakan sebelumnya, kita tidak bisa mengisolasi diri; kita harus bersahabat dengan negara-negara lain. Khususnya, jika kita ingin berperan dalam membangun perdamaian dunia, kita harus dipercaya oleh bangsa-bangsa lain. Agar bisa dipercaya, dihormati, disukai kita harus membuat kepribadian Indonesia dikenal, yang untuk itu kita perlu merunutnya ke belakang mulai dari abad ke-8.

Kedua, ada fungsi yang ditunjukkan ke dalam. Rakyat Indonesia tidak mungkin mengunjungi seluruh bagian Indonesia—Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Irian, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Itu tidak mungkin. Namun dengan mengunjungi proyek Taman Mini ini, mereka akan dapat melihat seluruh negara ini, dan juga memiliki rasa bangga menjadi sebuah bangsa, sebuah bangsa yang benar-benar kaya budayanya, alamnya, kaya flora dan faunanya, dan kaya dengan berbagai bentuk kesenian dan sebagainya. Itu akan menciptakan kesadaran berbangsa. Kesadaran berbangsa ini mutlak diperlukan jika kita ingin hidup sebagai sebuah bangsa, untuk meningkatkan kekuatan kita sebagai bangsa—dalam bidang ideologi, ekonomi, juga militer. Dengan demikian, Taman Mini ini bertujuan mengajarkan kita kesadaran berbangsa dengan menunjukkan keindahan Indonesia.

Selain itu, proyek ini memiliki fungsi selanjutnya: pembangunan ekonomi. Ada banyak orang dari negara-negara lain yang ingin melihat Indonesia, melihatnya dari dekat. Oleh karena itu, kita harus mengeksploitasi situasi ini. Kita perlu memperhatikan negara-negara lain. Untuk pembangunan kita memerlukan perdagangan luar negeri, kita memerlukan devisa. Jika kita mendatangkan turis asing, kita juga mendatangkan devisa. Inilah yang dilakukan negara-negara lain, seperti Italia, Spanyol, Swiss, dan Jepang. Dari pariwisata saja kita bisa memperoleh devisa lebih daripada Rp 1 milyar. Ini lebih banyak daripada hasil dari

seluruh ekspor kita, minyak dan barang-barang lain. Mengapa kita tidak bisa memperoleh keuntungan yang demikian ini dari keindahan Indonesia jika saya yakin bahwa masyarakat negara-negara lain ingin melihat negara kita?

Aspek lain dari Taman Mini Indonesia Indah, jika proyek ini bisa dilaksanakan adalah keuntungan sampingannya; lapangan pekerjaan, tidak hanya di dalam proyek itu sendiri, tetapi juga di bidang-bidang lain, misalnya melayani pengunjung dan menjual eskrim, kacang, rokok, dan lain-lain. Semua kegiatan sekunder ini akan tersedia bagi masyarakat, oleh karena itu, proyek ini akan menyumbang bagi penyediaan lapangan kerja. Jadi, dilihat dari segi tujuan dan cita-cita, proyek ini tidak bertentangan dengan strategi perjuangan bangsa untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Proyek ini juga tidak bertentangan dengan strategi pembangunan sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan kemerdekaan kita dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Proyek ini juga tentu saja tidak akan mempengaruhi keuangan pemerintah karena tidak akan dibiayai dari anggaran pemerintah.

Saya sangat yakin bahwa proyek ini penting. Namun saya tentu saja mengakui bahwa pemerintah harus mengutamakan proyek-proyek yang lebih penting. Itulah sebabnya mengapa proyek ini tidak dimasukkan dalam proyek pemerintah. Namun karena pembangunan itu bukan merupakan urusan pemerintah saja, dan sektor swasta juga memainkan peran, saya menyarankan mereka untuk menyelesaikan proyek ini. Jika sektor swasta bersedia membangun Taman Mini Indonesia Indah—tanpa memperoleh bantuan atau perlakuan istimewa dalam segala bentuk—maka saya katakan, jalan terus.

Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, kadang-kadang saya bertanya-tanya mengapa proyek Taman Mini Indonesia Indah ini...menjadi sedemikian kontroversial—dicampuradukkan dengan masalah keberanian mengkritik, tidak ada bedanya dengan Orde Lama, pelaksanaan hak-hak demokrasi, dan seterusnya. Jika hak-hak demokrasi dilaksanakan terlampaui jauh dilakukan tanpa kehati-hatian, demokrasi tidak akan ada lagi, dan strategi stabilitas yang penting bagi pembangunan akan berada dalam bahaya.

Sekarang prinsip apa yang meragukan? Yang ditakuti masyarakat adalah hambatan pembangunan. Sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap pembangunan, saya bisa menyatakan dengan tegas: saya menjamin bahwa proyek ini tidak akan menghalangi pembangunan. Yang justru sangat tepat adalah sebaliknya, karena proyek ini sama sekali tidak bertentangan dengan strategi pembangunan. Kedua, telah dikatakan bahwa proyek ini akan mempengaruhi pendapatan pemerintah. Sekali lagi, sebagai kepala pemerintahan, saya menjamin kepada Anda bahwa dana pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan, dengan jumlah Rp 231 miliar untuk tahun 1972-1973, sebagaimana saya katakan di hadapan DPR kemarin, tidak akan banyak terpengaruh bahkan jika Rp 10 miliar untuk proyek ini diambil dari anggaran pembangunan. Namun pemerintah sangat tegas dalam proyek ini: proyek ini tidak akan menggunakan dana anggaran pembangunan. Pendapatan pemerintah juga tidak akan terpengaruh.

Baiklah, jadi apa masalahnya? Mungkin karena pimpinan proyek ini adalah Bang Ali (Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin) dan sponsornya adalah Bu Harto, istri saya. Diciptakan kesan bahwa Taman Mini Indonesia Indah adalah sebuah proyek

mercusuar, sebuah proyek untuk memperpanjang masa jabatan. Ya Allah! Tidak demikian! Institusi-institusi seperti ini tidak ada.

Jika itu dipahami, jelaslah bahwa proyek ini sendiri sama sekali bukan masalahnya, melainkan proyek Taman Mini digunakan untuk menciptakan isu politik.

Lihatlah kenyataannya. Lihatlah pola kontroversi sejak 1968 dan 1969. Caranya mengangkat isu persis sama seluruhnya, selalu memelintir masalah ke arah yang berlawanan, menciptakan opini-opini antagonis dan kontraproduktif dan membingungkan masyarakat. Tujuan dasarnya adalah mendiskreditkan pemerintah. Selain itu, sebagaimana terjadi, orang-orangnya sama juga. Pelaku-pelakunya sama, dan saya tahu bahwa orang-orang yang di belakang layar juga sama.

Apa tujuan politik mereka yang sebenarnya? Kita tahu apa itu, dan itu bukanlah proyek Taman Mini. Tujuan yang sebenarnya, dalam jangka pendek, adalah mendiskreditkan pemerintah dan juga, tentu saja, orang yang bertanggungjawab, saya sendiri, sebagai kepala pemerintahan dan presiden. Sedangkan dalam jangka panjang mereka ingin mendepak ABRI keluar dari aktivitas eksekutif dan mengakhiri dwifungsi ABRI. Mereka ingin mendorong ABRI kembali ke 'baraknya', yakni, membatasi mereka pada fungsi keamanan saja.

Jika itu targetnya, bukan proyek Taman Mini yang berhak menjawab kecaman-kecaman mereka. Jawabannya harus diberikan oleh ABRI, dan jawaban ABRI sangat jelas. Sebagaimana telah saya katakan berulang kali, ABRI tidak akan menyerahkan dwifungsi mereka. Di atas dasar dwifungsi ini, ABRI—bersama-sama dengan kekuatan sosial lain—akan mampu menjaga UUD dan demokrasi kita. Bersama dengan kekuatan-kekuatan sosial yang lain itu, ABRI akan menempati posisi-posisi eksekutif dan legislatif.

Jadi, ABRI lah yang akan menjawab. Jika tujuannya adalah mendiskreditkan pemerintah dengan visi menentang saya keluar, itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Tidak perlu banyak cekcok tentang hal ini. Saya adalah kepala pemerintahan berdasarkan UUD kita. Kepala negara dipilih oleh wakil-wakil rakyat, yang sampai saat ini adalah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan selanjutnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Insyaallah, Majelis Permusyawaratan Rakyat terpilih akan bersidang tahun depan, bulan Maret 1973, untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara dan memilih seorang presiden dan wakil presiden. Ini akan memberi mereka kesempatan itu jika itu yang mereka inginkan. Mereka dapat mencalonkan diri mereka atau orang lain dalam sidang MPR untuk dipilih dalam pemilu sebagai presiden dan wakil presiden. Ini sangat mudah. Daripada banyak berselisih tentang masalah-masalah ini sekarang, lebih baik biarkan mereka bersaing satu sama lain dalam memberikan pengabdian mereka kepada negara dan biarkanlah rakyat memilih. Orang-orang yang memiliki reputasi pengabdian akan menjadi orang yang dipercaya oleh rakyat dan dipilih pada bulan Maret 1973, hanya 15 bulan dari sekarang, kurang beberapa hari.

Namun, jika mereka tidak bisa meunggu sampai Maret 1973, mungkin karena mereka sudah muak dengan saya, ada hal-hal yang dapat mereka lakukan lebih awal secara konstitusional, yakni, mengadakan Sidang Istimewa MPR. DPR yang sekarang ini, hasil dari pemilu, telah digabungkan dengan MPR oleh presiden. Dalam waktu dekat mereka akan digabungkan dengan perwakilan-perwakilan daerah dan partai-partai politik. Itu berarti sebuah Sidang Istimewa MPR bisa

diadakan kapan saja jika ini adalah permintaan para wakil rakyat. Jadi, jika mereka tidak bisa lagi menerima saya sampai Maret 1973, sebuah sidang istimewa dapat diadakan untuk mengganti saya. Ini mudah: tidak perlu ribut-ribut.

Namun izinkan saya mengingatkan satu hal kepada mereka. Segala sesuatu harus dilakukan secara konstitusional! Tujuan Orde Baru secara khusus adalah menegakkan UUD dan demokrasi. Jika kecenderungan-kecenderungan yang inkonstitusional muncul, saya akan kembali pada sikap yang saya ambil pada 1 Oktober 1965 ketika saya mengabdikan rakyat dengan melawan PKI yang ingin menginjak UUD dan Pancasila.

Pada saat itu tidak ada orang yang datang kepada saya untuk mendorong saya, apakah para pemimpin partai politik menawarkan dukungan kepada saya? Tidak. Tidak ada juga dari kelompok-kelompok pemuda yang datang. Tidak ada juga yang dari kalangan mahasiswa. Namun saya tidak peduli, siapa yang di belakang saya. Pada kenyataannya hanya ada satu orang, istri saya. Dengan enteng dia berkata kepada saya, 'teguhlah dalam keyakinanmu'. Itulah pesan istri saya kepada saya pada 1 Oktober. Itu adalah dorongan bagi saya dan memberikan saya kekuatan yang cukup untuk mendorong rakyat agar mengalahkan PKI.

Kemudian setelah hal itu berhasil dilakukan Front Pancasila dan Angkatan 66 dibentuk dan kemudian gerakan untuk mempercepat proses mengatasi penyimpangan. Dan saya didorong untuk bertindak secara konstitusional untuk mempercepat proses koreksi ini.

Dengan tegas ini saya tolak. Saya sudah tahu apa yang saya pikirkan. Bertindak sesuai UUD adalah masalah prinsip bagi saya. Karena semua koreksi harus dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional, Sidang Istimewa dan Sidang Umum MPRS diadakan, dan seterusnya. Segala sesuatu dilakukan secara konstitusional sehingga rakyatlah yang menentukan. Tanggungjawab saya adalah menjamin agar perubahan-perubahan tidak dilaksanakan dengan cara-cara inkonstitusional. Dan syukur alhamdulillah saya berhasil.

Sesudah itu ada lagi tekanan terhadap saya untuk mengambil langkah-langkah di luar konstitusi. Namun sebagaimana saya katakan syukur alhamdulillah saya berhasil. Jika waktu itu saya bertindak inkonstitusional ketika terjadi perpecahan yang sangat tajam, saya dapat membayangkan gambaran yang akan terjadi. Pasti sudah terjadi perang saudara dan situasi kita mungkin akan sangat berbeda saat ini.

Alhamdulillah kita mampu mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Saya dikritik karena melakukan semua ini dengan terlalu berhati-hati. Saya diejek sebagai orang Jawa yang 'alon-alon waton kelakon' (pelan-pelan tapi pasti), sebagai orang Jawa yang seperti siput yang sedang berjalan, seperti seekor siput yang cangkangnya terlalu besar dan berat untuk tubuhnya. Tidak apa-apa, yang penting adalah menjaga negara dan bangsa ini.

Dengan alasan itu jika ada orang-orang yang mencoba bertindak menyimpang dari konstitusi saya akan kembali kepada sikap yang saya ambil pada 1 Oktober 1965. Sangat jelas saya akan menghantam mereka, siapapun mereka, dan saya pasti akan mendapatkan dukungan penuh ABRI dalam hal itu.

Dan itu juga akan berlaku bagi mereka yang memanfaatkan hak-hak demokrasi mereka dan menggunakannya sebagai kedok yang menggunakan hak-hak mereka secara berlebihan semau mereka. Hak-hak itu adalah seperti bumbu, jika digunakan berlebihan akan merusak semuanya. Dan jika merusak demokrasi

akan mengakibatkan gangguan ketertiban dan situasi keamanan umum, gangguan stabilitas nasional dan gangguan pembangunan, itu tidak akan saya biarkan. Supaya anda mengerti apa yang saya maksudkan dengan “Saya tidak akan membiarkannya”, ijin saya mengatakan dengan terus terang bahwa saya akan mengambil tindakan. Jika orang-orang itu tidak mengindahkan peringatan-peringatan ini dan terus bertindak seperti yang mereka lakukan, saya akan mengambil tindakan. Dan jika ada ahli-ahli hukum yang memiliki keyakinan bahwa presiden tidak bisa lagi melakukan itu, bahwa akan bertentangan dengan hukum jika saya bertindak melawan mereka yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan-penyimpangan ini—jika mereka keras kepala dengan itu--baiklah, gampang saja. Demi kepentingan negara dan bangsa, saya dapat menggunakan Surat Perintah Sebelas Maret 1966, untuk menetapkan Negara dalam Keadaan Darurat. Jika perlu, saya bisa melakukan itu bahkan tanpa adanya keadaan darurat. Jika orang-orang itu akan terus menciptakan kekacauan, saya akan menjadikannya alasan untuk bertindak, dalam tanggung jawab saya terhadap rakyat dan Tuhan.

Seperti yang saya katakan sebelumnya, perbedaan pendapat tidak terelakkan dalam sebuah negara demokrasi, dalam lingkungan yang demokratis. Namun ada batas-batas bagi perbedaan pendapat itu. Batas-batas itu ditentukan oleh kebutuhan agar demokrasi selaras dengan tuntutan perjuangan kita. Tuntutan perjuangan kita saat ini adalah membangun, mengisi kemerdekaan. Bagi pembangunan, kestabilan politik dan ekonomi itu sangat penting, dan kestabilan politik memerlukan ketertiban dan keamanan.

Sumber: Pidato disampaikan dalam acara peresmian Rumah Sakit Pertamina di Jakarta pada 6 Januari 1972, menyusul protes mahasiswa menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Edisi bahasa Inggris pidato ini diambil dari transkrip resmi dalam Smith (1974: 235-40) Beberapa pemimpin geraka mahasiswa ditangkap segera setelah pidato ini disampaikan. (Direproduksi dalam Bouchier & Hadiz, 2006: 67-74)

Mohammad Daud Yoesoef:
“Aceh masih Mungkin Pisah”

Pada waktu artikel ini (Yoesoef 1999) muncul di surat kabar terbitan Banda Aceh pada 7 Maret 1999, kampanye menuntut referendum untuk kemerdekaan di Aceh tengah berlangsung. Mohammad Daud Yoesoef adalah dosen Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh.

Mengkaji ulang untai sejarah kelahiran Negara RI mestilah kita menelaah kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum RI diproklamkan pada tahun 1945. Kajiannya dapat didekati secara historis dan konstitusional. Pertama, secara historis, perlu diteliti dari suku-suku mana saja di Nusantara ini wakil-wakil yang hadir dalam pertemuan akbar, yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda 1928. Menurut data sejarah tidak ada satu orang Aceh pun yang mewakili bangsanya pada waktu itu dalam even sumpah pemuda tersebut.

Dalam proses pembentukan UUD 1945 pun hanya satu orang Aceh yang diikutsertakan dalam PPKI, yaitu Mr. Teuku Muhammad Hasan (almarhum). Tapi harap dicatat, ia tidak dapat dikatakan sebagai wakil bangsa Aceh, karena kedudukannya sebagai anggota PPKI hanya kebetulan saja, lantaran pada masa penjajahan Belanda ia berdomisili di Batavia dalam rangka sekolah. Ia mendapat kesempatan untuk itu atas dasar keturunan dari salah seorang penguasa daerah di Aceh yang diangkat oleh Belanda.

Kedua, secara konstitusional, UUD 1945 apabila ditelaah filosofi kelahirannya, tidak dapat dipisahkan dari pengaruh kolonialisme. Hal ini tercermin pada pemberian kekuasaan yang sangat besar kepada presiden. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga memegang kekuasaan legislatif dan masih dapat mencampuri urusan-urusan yang masuk wewenang yudikatif. Kekuasaan presiden yang sangat luas, menurut UUD 1945, itu tidak terlepas dari sisa pengaruh kekuasaan Gubernur Jendral masa Hindia Belanda. Pada masa itu dimaklumi bahwa hubungan antara negeri Belanda dan Hindia Belanda sangat jauh dan komunikasinya sangat sulit. Konsekuensinya, pemerintah di Negeri Belanda menyerahkan kekuasaan yang sangat besar kepada Gubernur Jendral di Hindia Belanda.

Di samping pengaruh tersebut, juga dapat dikatakan bahwa sebagian besar Panitia perumus UUD adalah mereka-mereka yang memperoleh pendidikan dari Belanda.

Kecuali itu, suatu UUD/konstitusi haruslah, selain memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai badan-badan pemerintahan beserta tugas-tugas pokoknya, menentukan dasar-dasar negara dan hak-hak warga negara/HAM, juga menentukan wilayah negaranya. Dengan kata lain, di dalam UUD itu disebutkan daerah-daerah mana saja yang termasuk dalam kedaulatan wilayahnya (*territorial sovereignty*). Ketentuan seperti itu dapat kita lihat dalam UUD/Grondwet Negeri Belanda, Konstitusi Malaysia, Filipina dan lain-lain.

Tapi, ketentuan mengenai daerah-daerah mana yang masuk dalam wilayah Negara RI tidak disebutkan dengan tegas dan jelas dalam UUD 1945, baik dalam batang tubuh maupun penjelasannya. Hanya dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 ada disebutkan contoh desa di Jawa dan Bali; Nagari di Minangkabau; dusun dan

marga di Palembang. Jadi wilayah Negara RI sebenarnya tidak jelas meliputi daerah-daerah mana saja yang merupakan kedaulatan wilayahnya. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka daerah-daerah di luar Jawa pada masa sekarang ini dapat menuntut pemisahannya dari Negara RI yang sejak tahun 1945 telah memasukkannya sebagai wilayah Negara Kesatuan RI dengan tidak mengindahkan aspirasi mayoritas rakyat di daerah-daerah di luar Jawa. Sesungguhnya, UUD 1945 itu dibuat atas dasar kepentingan Pulau Jawa dengan mengabaikan kepentingan-kepentingan daerah-daerah lainnya. Oleh karenanya, penolakan atau tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 adalah wajar dan merupakan hak dari rakyat di daerah-daerah luar pulau Jawa. Khususnya Aceh yang telah dieksploitasi berpuluh-puluh tahun, bahkan rakyatnya ditindas secara biadab selama DOM, sahlah menuntut pemisahan dari Negara Kesatuan RI. Sah pula menuntut penentuan nasib sendiri (*self determination*) melalui referendum, atau pun selemah-lemahnya semangat, hanya menuntut negara federasi.

Negara federal ditentukan adanya pemisahan kekuasaan negara antara pemerintah pusat (pemerintah federal) dan pemerintah daerah (negara bagian). Sistem pemerintahan federal ini cocok sekali bagi negara-negara yang memiliki wilayah geografis yang luas (terdiri atas kepulauan yang dipisahkan oleh laut), dan bagi negara-negara yang mempunyai keberagaman daerah sebagai akibat ketimpangan kondisi sosio-ekonomi dan perbedaan kultural, seperti wilayah negara Indonesia yang telah dikontrol oleh pemerintah pusat (Jakarta) selama jangka waktu lama. Demikian pandangan sarjana politik.

Tuntutan-tuntutan seperti tersebut di atas, bagi Aceh adalah hal yang mutlak. Oleh karena pemerintah pusat, khususnya pimpinan ABRI, selama ini tidak menampakkan *political will*-nya untuk menyelesaikan kasus-kasus Aceh selama DOM dan Pasca-DOM. Pemerintah menutup mata dan telinga terhadap jeritan hati rakyat Aceh. Padahal mereka mungkin sadar, bahwa rakyat Aceh tetap memiliki survival instinct, untuk tetap hidup secara manusiawi. Rakyat Aceh memiliki martabat yang selama ini telah diinjak-injak oleh ABRI. Oleh karenanya, demi martabatnya (national prestige), apapun rela dikorbankan selama pemerintahan tidak memberikan jalan keluar, alias tidak membuka *fase-saving exit* untuk menjawab nestapa dan ketertindasan Aceh selama ini.

Artinya, ditinjau dari segi apapun—historis dan konstitusional—apalagi dilihat dari spirit dan tekad Aceh yang sudah mengkristal saat ini, tidak ada kendala yang begitu berarti bagi Aceh untuk pisah dari Republik Indonesia, sebagaimana halnya Timtim. Dan, kalau Timtim bisa, kenapa Aceh tidak? Cuma, masalahnya, relakah republik melepaskan Aceh yang selama ini secara ekonomi sudah sangat menggemukkan pusat?

Sumber: David Bourchier dan Vedi R. Hadiz, *Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2006. Hal. 350-352

Tabrani Rab:
“Riau Merdeka, To be or not to be”

Ketika itu jam menunjukkan pukul 11.30 malam; bulannya September 1985. Saya bimbing juga mendiang Pak Soeman HS yang telah berumur 80 tahun, tertatih-tatih di seputar gang di jalan Seroja. “Assalamu’alaikum...,” kata pak Soeman. Kedengaran dari dalam suara “siape tuu...”. “kami...”, kata pak Soeman lagi.

Sekalipun Sudah ada sumpah ala pocong di sebuah rumah bahwa yang akan dipilih menjadi Gubernur Riau adalah Ismail Suko dan bukannya Jendral Besar Imam Munandar, namun usaha terakhir saya bersama pak Soeman adalah mengetuk pintu para anggota DPRD. Usaha kami ini dimaksudkan agar yang dipilih adalah Ismail Suko, orang kecil dari daerah ini, yang ‘mungkin’ tak sehebat sang Jendral dari Pacitan itu (Imam Munandar).

Ketika keesokan harinya pemilihan gubernur dilakukan oleh anggota DPRD, dengan hati berdebar-debar kami mengikuti acara pemilihan ini. Tampak Intan Judin, sang anggota DPRD, mencatat hasil pemilihan ini sambil tiap sebenar melihat arlojinya. Syahdan, benar saja, Ismail Suko berhasil memperoleh suara terbanyak. Tak ada rasa kegembiraan yang lebih besar, melihat hasil pemilihan ni. Saya pun langsung menelpon seorang rekan di Hamburg, Hans Kalipke. Besoknya, gemparlah Indonesia! Semua koran memuat berita hasil pemilihan.

Selang sehari, Simanunsong dari Majalah *Tempo* Medan menghubungi saya dan mengupas pemilihan ini menjadi *cover story* majalah tersebut. Teman saya, Zaili Asril, terus memuat berita ini di Koran *Kompas* secara beruntun. Eeee...komentar pertama ketika ditanya wartawan, “Apakah Ismail Suko bakal menjadi gubernur Riau?”, dengan tegas Benny Moerdani mengatakan: “Siapa bilang?”.

Tahulah saya kini bahwa hak-hak demokrasi di Riau telah terkubur. Dua tahun kemudian dalam depresi yang berat, Imam Munandar meninggal. Aneh, gubernur Lampung, yang juga meninggal dalam waktu yang tidak jauh berbeda dilantik menjadi gubernur dan orang Lampung lagi. Ketika Baharuddin Yusuf, teman sejak mahasiswa, saya nyatakan bahwa dia akan dilantik menjadi gubernur, maka Eba—panggilan Baharuddin Yusuf—tertawa lepas dengan ceria. Tak disangka tak dinyana, Soeharto malah mengirim *caretaker* Athar Sibero untuk mendudukkan Soeripto—mantan Panglima Komandan Kostrad dan ketua Fraksi ABRI di DPR RI. Untuk kedua kalinya tahulah saya bahwa secara politik Riau akan dilumatkan oleh pusat. Hilanglah hak-hak politik bangsa Riau.

Lebih dari 30 tahun sebelumnya, minyak Riau telah terkuras habis. Dan APBN sektor minyak ini, tetap lebih tinggi dari sektor lainnya. Untuk Sakai yang tersisa hanyalah kwartet dari ABRI, Pertamina, Caltex, dengan polisi. Birokrat sang lurah yang Golkar, merampok tanah Sakai yang penuh dengan minyak hanya

menghalau mereka. Padahal oleh kolonial Belanda mengakui tanah Sakai ini sebagai ‘Rokan Staaten’, dan diakui pula otonomi Sakai ini oleh Sultan Siak.

Tetapi pemerintah yang menamakan dirinya Republik Indonesia yang konon beradab itu, menghalau Sakai ini persis seperti babi hutan. Hancurnya sendi-sendi kehidupan ekonomi rakyat yang mengikuti Sakai Cleansing ini ketika 72,4 persen dari hutan Riau dibagikan kepada HPH dan usaha perkebunan sambil membawa ratusan ribu transmigran dari Jawa. Maka saya pun menyadari bahwa hilanglah hak-hak ekonomi bangsa Riau ini yang lebih terjamin ketika mereka dijajah Belanda dengan perjanjian pendek yang lebih dikenal dengan “Korte Verkraling”.

Belum juga lagi luluh lantak ekonomi dan politik di Riau, maka musibah baru pun muncul dengan keluarnya Undang-undang No. 5 tahun 1979 yang menyamakan struktur pemerintahan desa sebagai pusat budaya rakyat dengan pemerintahan di Jawa. Yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat adalah mengubah sistem unitarian menjadi uniformitas dan pada langkah selanjutnya menuju ke otoritarian. Semua bangsa Indonesia menyadari keanekaragaman dalam kesatuan, *Bhineka Tunggal Ika, unity in diversity, e pluribus unum ‘from many, one’* maka dari sini perang budaya sebagai simbol sosial—sebagai benteng terakhir—haruslah ditabuhgendangkan.

Akan tetapi, dengan undang-undang tersebut, hilanglah kepenghuluan di Riau, Wanua di Irian, Nagari di Sumatera Barat dan Subak di Bali. Sebab, sejak republik ini diproklamirkan, konflik pusat dengan daerah selalu diselesaikan pusat dengan senjata seperti pemberontakan Republik Maluku Selatan dari PRRI Permesta.

Khusus untuk Riau yang merupakan daerah penghasil devisa terbesar dengan sumbangan devisa sekitar Rp 60 triliun dalam setahun. Akan tetapi, hutan Riau habis dieksploitasi dan yang tertinggal hanya sekitar 0,2 juta hektar saja. Saat ini yang masih ‘perawan’ tinggal sekitar 450 ribu hektar. Bahkan pasir dari Riau dijual untuk reklamasi Singapura, serta sekitar 82,7 persen peranan hak ulayat rakyat Riau diambil oleh konglomerat di Jakarta. Daerah-daerah yang produktif, seperti Batam dan Natuna, justru dipisahkan dan dibentuk otorita sendiri. Hanya dua hal yang tertinggal; sampah dan limbah! Dan cuma debu saja yang belum sempat dikirim ke Jakarta.

Setelah 37 tahun menjadi bagian dari Indonesia, masyarakat Riau bukannya sejajar, baik dari segi pendidikan maupun ekonomi dengan masyarakat daerah lain. Akan tetapi, justru menjadi salah satu provinsi yang jumlah penduduk miskinnya paling banyak di Indonesia, yaitu mencapai angka sekitar 42,3 persen. Menjadi provinsi yang terburuk sesudah Timor Timur memisahkan diri. Sementara sumberdaya alam dijarah habis oleh pusat dan hampir semua desa di Riau tergolong dalam desa miskin.

Kita pun boleh melihat ke mana saja, ke hak-hak asasi manusia yang dikumandangkan oleh Nyonya Rossevelt tahun 1948 bahwa negara haruslah mampu melindungi hak-hak asasi manusia. Tetapi sejak republik ini didirikan dengan berkedok Undang-undang dasar 1945 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada

hakekatnya adalah pembabatan terhadap demokrasi dan hak-hak rakyat Indonesia dan khususnya untuk bangsa Riau.

Kita boleh juga melihat kepada *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights*. Bila hak-hak asasi ini telah hilang, maka sudah saatnya kita untuk menyatakan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Sebab Republik ini dibentuk berdasarkan konsensus saling mempercayai antara bangsa Riau dengan bangsa Indonesia, tanpa paksaan apa pun.

Maka kita pun kembali ke preambule Undang-undang Dasar 1945; “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa (termasuk bangsa Riau) dan oleh Sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan (termasuk penjajahan Republik Indonesia), karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Riau telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Riau ke depan gerbang kemerdekaan Riau, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Yang menjadi masalah utama cara untuk merebut kemerdekaan dengan kekerasan adalah selalu merupakan model pemisahan diri yang gagal. Terdapat setumpuk harapan yang diberikan contoh oleh Singapura dan Brunei, bagaimana mereka memisahkan diri dari Malaysia. *To be or not to be*, inilah jalan yang ingin dicapai oleh Gerakan Riau Merdeka.

Sumber: Tulisan ini dibuat Tabrani Rab sebagai pengantar buku Edyanus Herman Halim, *Mengapa Harus Merdeka?: Tangis dan Darah Rakyat Riau Dalam Memperjuangkan Sebuah Marwah*. Riau: Unri Press Pekanbaru, 2001. Hal. 15-20

Anonim:
“Andaikan Saya Manusia Merdeka”

Lonceng gereja berbunyi di seluruh Maubere. Di Setiap jalan kota bendera dan rumbai-rumbai berwarna-warna dipasang. Gedung kantor gubernur dan pos militer temboknya dicat, dan berulang-ulang dibersihkan. Halaman rumah-rumah penduduk diharuskan memasang bendera Merah putih. Terlihat kesibukan oleh ibu-ibu dharmawanita menyiapkan perayaan. Ada juga yang bikin panggung terbuka untuk pertunjukan musik, tari dan drama pada malam hari. Di siang harinya ada lomba olah raga dari tingkat desa sampai kota dari bermacam-macam jenis olahraga, di mana pemenangnya berhak mendapatkan hadiah. Seru! Dan ramai sekali.

Menurut laporan yang ditulis di surat kabar, kesibukan itu semua dilangsungkan untuk menyambut perayaan pembebasan Indonesia merdeka. Bulan Agustus tepatnya tanggal 17, bangsa Indonesia merdeka menjadi negara republik kesatuan.

Menurut lembaran sejarah yang ditulis oleh ahli dari Belanda maupun beberapa akademisi dari Australia, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh kolonial Belanda selama 3,5 abad dan diteruskan oleh penjajahan Jepang selama 3,5 tahun. Praktek penjajahan yang sulit dilupakan oleh bangsa Indonesia, mulai dari tindak kekejaman terhadap rakyat Indonesia maupun perampasan harta rakyat....

Sebuah perayaan yang bermakna tentunya kalau bangsa Indonesia sekarang ini menjadi bangsa yang merdeka. Saya sangat menghormati hari yang bermakna ini seperti banyak orang Indonesia. Sebab sebenarnya di mana letak bahagiannya sebagai manusia yang masih ditindas oleh penjajahan itu?

Seperti banyak orang-orang Indonesia nasionalis yang mencintai tanah airnya, saya pun mencintai tanah air saya bahkan lebih daripada yang terungkap dalam sebuah kata-kata semata.

Betapa gembira dan sorak sorainya jika mampu merayakan suatu hari nasional yang penting seperti itu! Saya ingin menjadi seorang merdeka, bukan nama tapi makna dari arti sebuah kemerdekaan bagi manusia yang tidak bisa dipalsukan dari negara kesatuan Indonesia, yang bebas dari setiap penindasan bangsa asing. Betapa gembira dan sorak sorainya perasaan saya nanti pada bulan Agustus, hari yang telah lama saya nanti-nantikan itu. Hari perayaan kemerdekaan. Betapa leganya hati saya nanti melihat bendera dwiwarna dengan batas merah berkibar. Suara saya akan menjadi serak karena menyanyikan ‘Indonesia Raya’ sesaat musik menggema. Saya akan bangga atas manifestasi itu, saya akan bersyukur kepada Allah SWT dalam masjid-masjid karena kemurahannya, saya akan berdoa demi keselamatan orang-orang Indonesia, termasuk mereka yang sedang berada di daerah pendudukan, supaya kemuliaan kekuasaan yang maha besar tetap berada di belakang kita.

Saya akan tetap membayar pajak bukan untuk merayakan hari kemerdekaan melainkan untuk melaksanakan rencana Jendral Try Sutrisno dan Jendral Benny Moerdani untuk menambah jumlah angkatan darat bangsa kita demi melindungi kemerdekaan Indonesia. Saya akan...sesungguhnya tidak tahu lagi apa yang akan saya lakukan jika saya seorang Indonesia, karena saya merasakan akan melakukan apa pun.

Tetapi nyatanya tidak begitu, andaikan saya seorang merdeka pun saya tidak akan mampu melakukan apa pun. Sesungguhnya saya inginkan perayaan kemerdekaan mendatang itu dihormati seluas mungkin, tetapi tidak akan saya izinkan penduduk negeri pendudukan mengikuti perayaan itu. Saya akan mengekang keinginan mereka untuk ke pesta ria, bahkan saya lebih suka perayaan itu tertutup bagi mereka supaya tak seorang pun dari pribumi Maubere mampu melihat kebahagiaan kita sewaktu kita merayakan kemerdekaan itu.

Menurut pendapat saya, ada suatu yang tidak pada tempatnya. Suatu yang tidak senonoh jika kita mengharuskan pribumi Maubere itu mengikuti pesta-pesta perayaan kemerdekaan kita. Sebab sementara kita merayakan kemerdekaan kaki kita menginjak kemerdekaan orang lain dan menduduki daerah orang lain. Tidakkah terasa oleh kita bahwa makhluk-makhluk yang malang ini juga sedang merindukan saat seperti ini, kapan mereka seperti kita, akan mampu merayakan kemerdekaan mereka?

Dengan pertimbangan ini, bukan hanya tidak adil melainkan juga salah, memerintahkan perlu membayar pajak untuk kelangsungan kemerdekaan negara kita. Dalam gagasan mempersiapkan peringatan kemerdekaan itu saja sudah cukup menghina mereka dan sekarang kita bahkan merampok isi kantong mereka. Sesungguhnya itu adalah penghinaan secara moral dan material.

Di manakah sebenarnya letak keuntungan kita menyelenggarakan peringatan perayaan itu di tanah Maubere? Jika peringatan itu merupakan pernyataan kebahagiaan bangsa Indonesia, tidaklah bijaksana bahwa perayaan kemerdekaan itu harus dirayakan di negeri yang terjajah. Akan terjadi perlawanan satu lawan satu di tengah masyarakat itu. Atau apakah kita ingin menyombongkan kekuasaan dalam suatu pengertian politik? Terutama dalam masa sekarang ini rakyat Maubere sedang giat mengorganisasikan diri mereka, masih terluka sebab menerima konsekuensi dari kesadaran mereka, berdasarkan taktik maka tidak pantas memberi contoh tentang bagaimana seharusnya merayakan kemerdekaan mereka.

Harapan-harapan mereka sedang terbangkitkan kembali, secara tidak sadar kita membangunkan keinginan-keinginan dan cita-cita mulia mereka untuk kemerdekaan di masa mendatang. Apabila bulan Agustus tahun ini berlalu, kolonialisme Indonesia telah melaksanakan suatu kebijaksanaan yang tidak bertanggungjawab. Saya tidak mau melaksanakan tanggungjawab untuk merayakan kemerdekaan meskipun sekiranya saya orang yang merdeka.

Jika saya seorang yang merdeka pada waktu ini, saya akan melakukan suatu protes terhadap keinginan menyelenggarakan suatu perayaan. Saya akan menulis dalam setiap surat kabar, mengumumkan bahwa keinginan seperti itu adalah salah. Saya akan memperingatkan pada semua teman saya sesama kolonialis tentang bahayanya menyelenggarakan perayaan kemerdekaan pada waktu ini. Saya akan menasehati semua orang Indonesia supaya jangan melukai perasaan rakyat Maubere yang telah mulai berani mengingkari kita dan yang sebenarnya dapat berbuat demikian. Sesungguhnya saya akan memprotes sekeras-kerasnya sebagaimana kekuasaan membenarkan saya.

Tetapi saya bukan seorang yang merdeka, saya hanya seorang pribumi jajahan dari bumi Timor Timur, seorang yang didera hukum kolonialisme Indonesia tiap hari, oleh karenanya saya tidak punya kekuatan lagi memprotes.

Karena jika saya benar-benar memprotes, pemerintah akan marah kepada saya, mereka akan menganggap saya sebagai menghina Indonesia yang sekarang memerintah negeri saya. Itu sebabnya saya tidak mau, tidak boleh saya lakukan lagi.

Mereka juga akan menganggap saya telah bertingkah laku tidak senonoh terhadap Paduka Yang Mulia Presiden, Presiden Yang Terhormat, dan tindakan seperti itu tidak dapat dimaafkan karena saya adalah seorang pribumi dari jajahannya dan yang mesti selalu setia kepadanya.

Karena ini saya tidak akan protes. Sebaiknya saya akan mengikuti perayaan-perayaan itu. Adalah tugas saya sebagai seorang pribumi dari negeri jajahan ini mengikuti perayaan-perayaan kemerdekaan negeri Indonesia itu, tanah air penjajah saya. Karena ini adalah suatu kesempatan yang baik bagi kita memperlihatkan kesetiaan kepada Republik Indonesia.

Betapa bahagianya saya. Syukurlah saya bukanlah orang merdeka dan bangsa Indonesia.

Baik, saya mulai muak dengan kata sindiran ini dan saya akan mengesampingkan semua sindiran pada pemulaan artikel ini. Apa yang melukai perasaan saya dan perasaan orang-orang senegeri saya adalah terutama gagasan supaya orang-orang pribumi harus membiayai pekerjaan-pekerjaan yang keuntungan-keuangannya mereka sendiri tidak turut kebagian. Apakah keuntungannya bagi saya, perayaan yang kami turut membantu penyelenggaraannya? Sedikit pun tidak. Paling hanya mengingatkan kami bahwa kami bukanlah rakyat merdeka dan bahkan "Indonesia tidak memberikan kemerdekaan kepada kami." Paling tidak selama Tuan Theo Syafei memerintah negeri ini.

Kami rakyat Maubere telah merdeka berbentuk negara Republik Demokrasi Timor Timur pada tanggal 7 Oktober 1975 telah menjalankan roda pemerintahan berarti rakyat Timor merdeka penuh dari kolonialis asing dengan ibukota di Dili. Tetapi tiba-tiba tanggal 15 Juli 1976 Timor Timur diklaim menjadi bagian dari daerah Indonesia tanpa mengindahkan kemerdekaan dari kedaulatan rakyat Timor Timur.

Jadi sangat sulit bagi saya untuk percaya pada sebuah pemerintahan yang hanya dilandasi slogan-slogan menifestasi yang bagaimana pun indahnya sampai sakral dikatakannya tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan dan keadilan serta hak hidup bangsa lain.

Saya sadar dan rakyat di Maubere pun telah mengenal siapa pemerintahan Indonesia itu sebenarnya. Tak ada bedanya dengan kolonialis dunia lainnya. Militer Indonesia pun tangannya menumpahkan darah di bumi Maubere. Kalau Belanda menjajah Indonesia menjagal manusia Indonesia lewat JP Coen, Daendels, sampai Westerling memakan korban nyawa, sekarang militer Indonesia pun tidak kurang-kurangnya membunuh rakyat Maubere. Di tahun 1985 Amnesti Internasional yang berkedudukan di London melaporkan, diperkirakan 200.000 rakyat Timor Timur telah terbunuh oleh tentara pendudukan Indonesia selama 16 tahun menguasai Timor Timur. Dan tindak teror setiap saat dan jam terus dijalankan seolah kami binatang yang membahayakan bagi sebuah negara besar seperti Indonesia ini.

Peristiwa arak-arakan di pemakaman Santa Cruz memperlihatkan wajah sang kolonial Indonesia sebenarnya. Di mana rakyat tak berdaya selalu diintimidasi

bahkan dibunuh seperti nyawa manusia tak ada artinya. Peristiwa 12 November 1991 di Santa Cruz adalah budaya kebiadaban yang disandang oleh kolonialisme Indonesia seolah yang dihadapi adalah sosok manusia yang tidak punya hak hidup.

Dengan tanpa beralasan para militer Indonesia menimpakan penyebab peristiwa itu pada rakyat kami. Bahkan diantara kami yang muda dan tahu peradaban dunia telah memprotes tindakan brutal itu malah dituduh melakukan sebuah kerusuhan di sebuah negeri yang menghormati kemerdekaan ini. Para militer Indonesia yang jelas-jelas membunuh dengan brutalnya pada bangsa kami hanya dijatuhi hukuman tak lebih dari 10 bulan sedang kami yang menderita diinjak-injak kemerdekaan dan martabat kami sebagai manusia malah dijatuhi hukuman seumur hidup.

Jelaslah bagi saya sekarang ini bangsa yang memuliakan kemerdekaannya lewat UUD 1945 dan falsafah Pancasila tak lebih dari gerombolan perompak di lautan Timor. Sejak awal perjuangan kemerdekaan sewaktu terjadi perundingan penentuan hari depan bangsa kami, pemerintah Indonesia tidak pernah simpati pada pembebasan rakyat Timor Timur yang sejati.

Bahkan para pejabat sampai Presiden Indonesia mengatakan: adalah kemungkinan yang 'paling kecil' dengan alasan rakyat Timor Timur belum mempunyai tenaga terdidik untuk membentuk pemerintahan yang capable; kedua, *national resources* yang dipunyai tidak memadai bagi jaminan berdirinya sebuah negara yang bebas, merdeka dan berdaulat.

Betapa sombong dan congkaknya pernyataan pernyataan pemerintah Indonesia ini, saya jadi teringat hujatan tuan-tuan Belanda pada para budaknya bangsa Indonesia. Sekarang hujatan tuan Belanda itulah yang dipakai oleh si budak pemerintah Indonesia yang sekarang menjadi tuan kepada kami rakyat di Maubere.

Pemerintah Indonesia sebagai budak bangsa Belanda memang sekarang menjadi budak yang mewarisi sifat tuannya. Sampai dia sendiri lupa bahwa bangunan nasionalisme Indonesia itu pun lahir dari rekayasa politik etis Belanda. Bagaimana bisa seorang yang pernah luka oleh sebuah penindasan sekarang mempraktekkan penindasan pada bangsa lain!

Apakah semangat nasionalisme bangsa Indonesia itu tidak pernah lahir atas landasan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan? Rakyat kami terus tercengang ketika pemerintah Indonesia terus mengangkut kekayaan minyak bumi dan cadangan gas alam yang semuanya mempunyai nilai investasi sebesar US\$ 261,72 miliar diangkut para perampok Indonesia dan kapitalis barat lainnya. Padahal tiap hari rakyat Maubere hanya menerima imbalan hardikan dan pembunuhan dan tuduhan subversif sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia yang secara jelas tak pernah dirundingkan dengan rakyat kami.

Apakah saya terus meyakini keadilan yang terus dipaksakan oleh pemerintah Indonesia sekarang ini? Kami dibuat miskin dan dirampas hak hidup kami, tetapi masih diharuskan mengatakan Indonesia negara republik yang berkeadilan dan berprikemanusiaan.

Sebenarnya saya sadar gagasan perayaan kemerdekaan di tanah Timor Timur tidaklah banyak artinya. Sebab sesungguhnya jika saya orang yang sudah merdeka saya tidak akan pernah merayakan peringatan kemerdekaan di sebuah negeri yang masih sedang dijajah. Pertama-tama saya akan memberikan rakyat yang terlanjur kita jajah itu kemerdekaan kita secara konsekuen.

Sumber: David Bourchier & Vedi R. Hadiz, Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2006. Hal. 352-358. Dalam pengantar untuk tulisan ini, Bourchier dan Hadiz menulis: Pada 1913 seorang nasionalis Indonesia Soewardi Soeryaningrat membuat skandal ketika artikelnya yang berjudul "Seandainya saya seorang Belanda" muncul dalam surat kabar berbahasa Belanda De Express. Artikel yang terkenal itu memanfaatkan perasaan seorang nasionalis Belanda menjelang seabad kemerdekaan Belanda dari kekuasaan Napoleonik untuk menunjukkan bahwa rakyat Indonesia juga memiliki cita-cita yang sah untuk meraih kemerdekaan. Dalam dokumen yang disebarluaskan melalui jaringan surat elektronik pada 1992 ini, seorang nasionalis Timor Timur yang anonim dengan sengaja meniru taktik yang sama, dan menggunakan banyak bahasa yang sama, untuk mengimbau orang Indonesia agar mengakui cita-cita rakyat Timor timur. Versi bahasa Inggris yang sudah diringkas dari naskah berbahasa Indonesia pertama kali muncul dalam Inside Indonesia (Desember, 1992: 7-8).



Manuel Kaisiepo:
“Permasalahan di Irian Jaya”

Penting untuk dipahami, aksi-aksi perlawanan yang muncul secara sporadis hingga beberapa tahun terakhir ini tidak lagi dilandasi oleh tujuan separatis ingin mewujudkan ‘Negara Papua’, melainkan lebih karena faktor-faktor lain, misalnya ketidakpuasan sosial.

Gerakan-gerakan perlawanan yang bersifat sporadis itu walau pun masih menyandang nama OPM, namun sesungguhnya hanya ‘OPM’ (dalam tanda petik) yang tidak dilandasi oleh keyakinan, cita-cita dan tujuan politik yang jelas.

Yang menjadi persoalan sekarang, sekalipun eksistensi gerakan-gerakan perlawanan dengan nama ‘OPM’ itu tidak berarti lagi secara politik dan lebih-lebih secara militer, tetapi tetap perlu mendapat perhatian mengapa gerakan-gerakan itu masih ada hingga kini. Sebab tanpa pemahaman yang jelas akar persoalannya, kita senantiasa akan tergelincir dalam kesimpulan keliru mengenai aksi-aksi perlawanan tersebut.

Ada dua faktor yang tampaknya langsung atau tak langsung berkaitan dengan masih munculnya gerakan-gerakan perlawanan tersebut. *Pertama*, efek sampingan dari pendekatan keamanan yang untuk jangka waktu cukup lama dijalankan di daerah Irian Jaya. *Kedua*, dampak dari beberapa program pembangunan yang justru dirasakan rakyat setempat sebagai merugikan kepentingan mereka.

Trauma ‘OPM’

Pendekatan keamanan dalam bentuk-bentuk operasi militer yang dijalankan secara intensif dan dalam waktu yang cukup lama di Irian Jaya, memang dimaksudkan untuk menumpas perlawanan OPM selama periode 1965 hingga 1970. Operasi-operasi militer yang intensif itu pada satu pihak bisa menghancurkan kekuasaan kelompok-kelompok perlawanan OPM, namun meninggalkan ‘efek sampingan’ berupa rasa takut yang mendalam dan berlarut-larut bahkan menjadi trauma di kalangan rakyat Irian.

Mereka senantiasa dihantui trauma dicap sebagai ‘OPM’, suatu trauma yang mirip dengan apa yang dialami sebagian penduduk pedesaan Jawa usai penumpasan G30S/PKI tahun 1965/1966, yaitu ketakutan dicap sebagai ‘PKI’.

Celakanya, ketakutan akan cap ‘OPM’ itu seringkali justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, baik dari aparat pemerintah maupun swasta, untuk menakut-nakuti rakyat. Apabila rakyat misalnya menolak melepaskan tanah-tanah mereka untuk keperluan pembangunan proyek-proyek pemerintah atau swasta, dengan mudah mereka akan dicap ‘OPM’.

Ketakutan dicap sebagai ‘OPM’ itulah yang sering menjadi faktor pendorong bagi sebagian rakyat Irian untuk melarikan diri ke hutan, atau malah menjadi pelintas batas menyeberang ke negara tetangga PNG. Sesungguhnya tindakan mereka melarikan diri ke hutan, atau menyeberang ke PNG hanyalah merupakan tindakan mencari selamat, atau semacam mekanisme pertahanan diri (self defense mechanism).

Melarikan diri ke hutan, hanya karena takut dicap OPM, seringkali malah berbalik menjadi bumerang, karena dengan tindakan mereka seperti itu, akhirnya

benar-benar dicap sebagai OPM, dan kembali menjadi sasaran operasi militer. Contoh dari kasus semacam ini adalah peristiwa ‘eksodus’ sejumlah besar rakyat Irian ke Papua Nugini awal tahun 1984.

Pembangunan dan kemiskinan

Pembangunan yang dijalankan pemerintah Indonesia di Irian Jaya sejak integrasi hingga kini memang telah berhasil di beberapa sektor dan hasilnya benar-benar bisa dirasakan rakyat Irian Jaya.

Tapi di sisi lain, pendekatan pembangunan yang dilakukan dan dampak dari beberapa program pembangunan yang ada, justru merugikan rakyat Irian, yang seterusnya menimbulkan rasa tidak puas, kecewa, bahkan pada titik ekstrem, mendorong mereka melakukan aksi-aksi perlawanan. Beberapa contoh ala kadarnya akan dikemukakan di bawah ini.

Pembebasan tanah-tanah adat milik rakyat untuk keperluan penebangan kayu (HPH), untuk program transmigrasi atau proyek-proyek lainnya tanpa menghiraukan hukum adat yang dianut rakyat setempat, sering menjadi pemicu timbulnya rasa tidak puas yang kemudian meningkat menjadi aksi perlawanan kepada pemerintah.

Membanjirnya transmigran dari Jawa dan arus migran dari Sulawesi Selatan yang menguasai hampir seluruh sektor dari kelas menengah sampai kelas bawah, jelas dirasakan suatu yang tidak adil buat rakyat Irian Jaya.

Dalam catatan Kanwil Transmigrasi Irian Jaya, diketahui bahwa jumlah transmigran dari Jawa sejak Pelita I hingga Pelita V terus meningkat, dan pada bulan April 1993, 23.947 KK atau sebanyak 102.941 jiwa.

Sedangkan arus migran dari Sulawesi Selatan yang datang ke Irian Jaya, menurut penelitian George J. Aditjondro, adalah sebesar 3.000-4.000 orang setiap tahun, sehingga dalam periode 1970-1985 diperkirakan sekitar 60.000 migran asal Sulsel yang menetap di Irian Jaya, yang tentunya jumlah lebih membesar lagi saat ini.

Kehadiran para migran itu ternyata membawa beberapa dampak negatif, di antaranya:

1. cara berjual beli yang tidak fair;
2. persaingan usaha yang tidak seimbang antara mereka dengan penduduk asli;
3. Pengurasan sumber-sumber alam hayati di laut maupun di darat;
4. Konflik-konflik tanah;
5. Perkawinan bermotif bisnis;
6. Kriminalitas.

Demikian pula kalau kita persoalkan perasaan tidak puas di kalangan muda lulusan SLA dan Perguruan Tinggi yang menganggur, karena sebagian besar pekerjaan telah diduduki oleh ‘pendatang’ (suatu istilah yang punya konotasi negatif).

Dari data Kanwil Depnaker Irja tahun 1992, terungkap bahwa jumlah pencari kerja terbesar adalah lulusan SLTA sebanyak 67.418 orang, disusul SD sebanyak 23.018 orang, SLTP 15.369 orang dan sarjana/diploma sebanyak 5.902

orang. Jumlah besar generasi muda yang belum mendapat pekerjaan itu, jelas bisa melahirkan berbagai implikasi sosial yang cukup pelik.

Belum lagi kalau disinggung soal kemiskinan di kalangan rakyat Irian, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan. Dari 11 Propinsi yang secara regional mempunyai persentase penduduk miskin yang berada di atas rata-rata nasional pada tahun 1987, Irian Jaya berada di urutan teratas (Booth:348)

Demikian juga kalau kita amati investasi pembangunan dan pendapatan per kapita di Irian Jaya. Investasi di daerah ini cukup besar di sektor pertambangan dan pengelolaan hutan. Dalam urutan komposisi PDRB Irian Jaya menurut Lapangan Usaha tahun 1990, sektor pertambangan adalah yang terbesar, yaitu 31,55 persen.

Masalahnya keuntungan dari proyek pertambangan ini menjadi milik pemerintah pusat, sehingga hanya sedikit hasilnya yang bisa dinikmati penduduk Irian Jaya sendiri. Akibatnya ironis, dari segi pendapatan per kapita Irian Jaya adalah paling tinggi, namun kesejahteraan penduduknya lebih buruk dibandingkan daerah lainnya. Pendapatan per kapita Irian Jaya tahun 1985 sebesar 565.086 persen dan tahun 1990 sebesar 690.339 persen dengan rata-rata pertumbuhan 4,43 persen.

Akumulasi dari berbagai rasa tidak puas dan kecewa terhadap dampak negatif pembangunan, serta realitas kemiskinan yang melilit kehidupan rakyat Irian Jaya, jelas merupakan faktor-faktor yang sering menjadi pendorong bagi sebagian dari mereka untuk melarikan diri ke hutan, membentuk gerombolan-gerombolan bersenjata melawan pemerintah, atau melintas batas ke PNG.

Jelas bahwa aksi-aksi perlawanan sejak tahun 1970 hingga saat ini yang dilatarbelakangi oleh rasa ketidakpuasan dan kemiskinan itu, bukanlah gerakan yang dilatarbelakangi oleh tujuan politik ingin membentuk 'Negara Papua' seperti halnya di tahun 1965 hingga 1970, walau pun dengan mudah mereka akan dicap 'OPM'.

Sumber: David Bouchier dan Vedi R. Hadiz, *Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999*, Jakarta: Pt. Pustaka Utama Grafiti, 2006. Hal. 346-350. Tentang asal-usul tulisan ini, Bouchier & Hadiz memberikan catatan sebagai berikut; "Intisari ini berasal dari makalah seminar oleh waratawan moderat dari Papua, Manuel Keisiepo, yang menyoroti sejumlah keluhan utama rakyat Papua di bawah Orde Baru. Makalah ini juga menggambarkan sulitnya memunculkan gagasan nasionalisme regional dalam atmosfir politik yang mengabaikan semua gagasan. Makalah berjudul 'Ke-Irian-an dan Ke-Indomnesia-an: Mengkaji Nasionalisme dalam konteks lokal' ini disampaikan dalam sebuah seminar tentang nasionalisme Indonesia Menjelang dan Pada Abab XXI' di Salatiga pada Juni 1993 (Kaisiepo, 1993)